

PERAN BP4 SEBAGAI MEDIATOR DALAM MEMBINA KELUARGA  
SAKINAH, MAWADDAH, DAN RAHMAH DI KECAMATAN GANTARANG  
KABUPATEN BULUKUMBA



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjanah Hukum Islam Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan  
Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

Kartini Rustan

NIM: 10100113123

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2017

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartini Rustan  
NIM : 10100113123  
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba, 10 November 1995  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Peradilan Agama/Peradilan/S1  
Fakultas/Program : Syari'ah dan Hukum/S1  
Alamat : BTN Samata Indah  
Judul : Peran BP4 sebagai Mediator dalam Membina Keluarga  
Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah di Kecamatan Gantarang  
Kabupaten Bulukumba.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhannya, maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

Makassar, 13 Desember 2016

Penyusun,

Kartini Rustan

NIM: 10100113123

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "PERAN BP4 SEBAGAI MEDIATOR DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH MAWADDAH DAN RAHMAH DI KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA", yang disusun oleh Kartini Rustan, NIM: 10100113123, mahasiswa Jurusan Peradilan, Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017 M, bertepatan dengan 7 Rajab 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H.) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 4 April 2017 M.  
7 Rajab 1438 H.

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Darussalam, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hamsir, M.Hum.	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Supardin, M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.	(.....)

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Darussalam, M.Ag.  
NIP. 196210161990031003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji hanya milik Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Salam dan shalawat senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu' Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya uswah dan qudwah, petunjuk jalan kebenaran dalam menjalankan aktivitas keseharian kita.

Melalui tulisan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Rustan. K dan Ibunda Fatiha serta seluruh keluarga yang telah memberikan perhatian dan pengorbanan serta keikhlasan doa demi kesuksesan penulis. Selain itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, Rektor UIN Alauddin Makassar beserta wakil rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan para wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Dr. H. Supardin. M.Hi dan Dr. Fatimah, M.Ag. selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. H. Supardin M.Hi dan Dr. H. Abdul Halim Talli, M.Ag. selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan arahan dan koreksi dalam menyusun skripsi ini dan membimbing penulis sampai taraf penyelesaian.



5. Para Dosen, dan Karyawan dan Karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang secara konkrit memberikan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung.
6. Dan yang terpenting skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda Rustan, K S.pd, dan Bunda Fatihah sebagai ungkapan terima kasih tk terhingga karena telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Serta memberikan semangat kepada penulis dan juga memberikan doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
7. Nurwahidah Rustan, kakakku tercinta yang telah memberikan motivasi, dorongan dan bantuannya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman Peradilan Agama angkatan 2013 terutama PA C atas keikhlasan dan dorongan selama penulis menempuh pendidikan dibangku kuliah, semoga rasa solidaritas kita jangan sampai terlupakan

Tiada balasan yang dapat diberikan penulis, kecuali kepada Allah SWT penulis harapkan balasan dan semoga bernilai pahala disisi-Nya. *Aamiin Ya Rabbal Alamin*

Semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi penulis, tapi juga untuk masyarakat luas.

Samata, Desember 2016  
Penulis

Kartini Rustan  
Nim. 10100113123

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRASNSLITERASI.....	ix
ABSTRAK .....	xv
BAB I    PENDAHULUAN .....	1-9
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus.....	5
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan.....	9
BAB II    TINJAUN TEORETIS .....	10-40
A. BP4 (Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)	
1. Pengertian BP4 (Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) .....	10
2. Sejarah BP4 .....	11
3. Visi dan Misi BP4.....	15
4. Tujuan BP4 .....	15
5. Usaha dan Upaya BP4 .....	16
6. Fungsi BP4.....	17
B. Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah.....	18

1. Pengertian Keluarga.....	18
2. Fungsi Keluarga.....	20
3. Pengertian Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah.....	21
C. Ciri-ciri dan Kriteria Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah.....	24
D. Cara Membangun Keluarga Sakinah.....	28
E. Dasar-dasar Pembinaan Rumah Tanggah Sakinah.....	33
F. Konsep keluarga sakinah menurut islam.....	34
G. Bekal Meraih Rumah Tangga Sakinah.....	37
H. Problematika Yang Muncul Dalam Keluarga .....	40
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>42-47</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	42
B. Pendekatan penelitian.....	42
C. Sumber data .....	43
D. Metode Pengumpulan Data .....	43
E. Instrumen Penelitian.....	44
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	45
G. Pengujian Keabsahan Data .....	46
<b>BAB IV PERAN BP4 DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH DI KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA</b>	
A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Gantarang.....	48-51
1. Sejarah Kecamatan Gantarang.....	48
2. Letak Geografis dan Demografis.....	48
B. Struktur Organisasi BP4 Kec. Gantarang.....	51

C. Kendala dan pendorong pelaksanaan Tugas-tugas BP4 di Kecamatan Gantarang .....	54
D. Efektifitas BP4 sebagai Mediator dalam Membina Keluarga Sakinah.....	57
BAB V PENUTUP.....	66-68
A. Kesimpulan.....	66
B. Implikasi Penelitian .....	68
KEPUSTAKAAN .....	69-71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



## Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	a	tidak dilambangkan
ب	ba	b	bc
ت	ta	t	tc
ث	ša	š	es (dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	k	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	s	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	y	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ىَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
وْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
ىِ	<i>Kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

### 4. Tā'marbūtah

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua, yaitu: tā' marbūtah yang hidup Ta'marbutah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) dilambangkan dengan huruf "t". ta'marbutah yang mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudal al-at fal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### A. Syaddah (Tasydid)

Tanda Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjainah*

#### B. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "I" (ل) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:



الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

### C. Hamzah

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah terletak di tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal

أَمِرْتُ : *umirtu*

2. Hamzah tengah

تَأْمُرُونَ : *ta' muruna*

3. Hamzah akhir

شَيْءٌ : *syai'un*

### D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

*Fil Zilal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

#### **E. Lafz al-Jalalah ( ﷲ )**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاﷲِ *billah* دِيْنُ ﷲِ *Dinullah*

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ ﷲِ *Hum fi rahmatillah*

#### **F. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandang.

Contoh: *Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an*

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

## ABSTRAK

Nama : Kartini Rustan  
Nim : 10100113123  
Judul : Peran BP4 sebagai Mediator dalam Membina Keluarga Sakinah,  
Mawaddah dan Rahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten  
Bulukumba

---

Pokok permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini adalah Bagaimana Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kendala dan pendukung BP4 sebagai mediator dalam membina keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta Bagaimana efektifitas BP4 sebagai mediator dalam membina keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah di kecamatan gantarang kabupaten bulukumba.

Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan yuridis syar'i, serta melalui informan (masyarakat kecamatan gantarang dan pejabat KUA Gantarang), selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan BP4 masih mempunyai kendala-kendala BP4 dalam melaksanakan tugasnya seperti sosialisasi yang kurang, belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4, masih lemahnya hubungan BP4 dengan instansi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan serta terbatasnya fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan tugas penasihat dan pembinaan keluarga. Serta pendukung pelaksanaan tugas-tugas BP4 yaitu kesediaan masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah, besarnya harapan dan pembentukan keluarga sakinah, adanya dukungan para tokoh agama terhadap penasihat perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah. serta efektifitas BP4 sebagai mediator belum cukup efektif karena kurangnya peran BP4 sehingga membuat masyarakat lebih memilih langsung mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dari pada melakukan konseling di BP4, BP4 merupakan lembaga yang berdiri sendiri dan pada tahun 2009 telah lepas dari Kementrian Agama. sesuai hasil Munas ke 14 ditegaskan BP4 bukan lagi bagian dari Kementrian Agama dan tetap menjadi mitra Kementrian Agama. Dan juga tidak adanya aturan atau Undang-undang yang secara resmi yang menyatakan bahwa BP4 adalah lembaga yang dapat memediasikan perceraian sebelum ke Pengadilan Agama.

Implikasi dalam penelitian ini adalah: Agar kiranya KUA Kecamatan Gantarang pada saat memberikan nasehat kepada calon pengantin dapat juga mensosialisasikan keberadaan, fungsi dan peran BP4 agar kelak jika hendak ingin

bercerai tidak langsung ke Pengadilan Agama tapi ke BP4 dulu, jika nasehat yang diberikan pihak BP4 tidak berhasil maka baru ke Pengadilan Agama untuk bercerai, dan untuk pemerintah sebaiknya melakukan kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah lainnya agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 serta dapat meningkatkan SDM nya, dan untuk para tokoh agama hendaknya dalam berdakwa tidak hanya menyampaikan ubudiyah (penghambaan kepada Allah) dan fiqhiyyah tetapi juga membahas masalah keluarga, bagaimana rumah tangga menjadi sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>.

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia baik perorangan atau kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami isteri. Anak keturunan dan hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.<sup>2</sup>

Perkawinan dilaksanakan oleh seseorang yang sudah cukup umur tidak peduli profesi, suku, agama, kekayaan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Setiap orang yang melangsungkan pernikahan tidak semuanya dapat memahami hakikat perkawinan dan tujuan perkawinan yaitu mendapatkan kebahagiaan sejati dalam rumah tangga. Perkawinan bukan sekedar berkumpulnya dua orang manusia dalam satu atap kemudian mendapatkan keturunan, bukan pula untuk sementara waktu tapi untuk seumur hidup.

Setiap pasangan suami isteri pasti menginginkan rumah tangganya bahagia, karena membina rumah tangga pada prinsipnya adalah mencari

---

<sup>1</sup>Pasal I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 147.

<sup>2</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta; UII Press, 2000). h.4.

kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat nanti dan keluarga sakinah merupakan idaman bagi setiap keluarga muslim.

Di samping itu membangun keluarga yang sakinah merupakan cikal bakal lahirnya anak-anak yang berkualitas, mandiri, memiliki ketahanan mental dan spiritual yang kokoh yang pada gilirannya akan terwujud masyarakat dan bangsa yang maju dan mandiri.

Mewujudkan keluarga sakinah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dalam dinamika kehidupan berkeluarga, perjalanan pasangan suami isteri tidak terlepas dari rintangan, bahkan terkadang kerikil-kerikil kecil sering menyertai kehidupan berkeluarga. Mewujudkan keluarga sakinah perlu adanya upaya dan tekad yang kuat dari masing-masing pasangan, selain menerima kekurangan dan kelemahan masing-masing. Selain itu, juga diperlukan kesabaran dan keuletan dalam mengarungi bahtera rumah tangga serta pengamalan terhadap ajaran agama, dimana hakikat pernikahan adalah dalam rangka melaksanakan sunnatullah.

Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan damai harus dimulai dari pembinaan keluarga terlebih dahulu. Jika semua keluarga yang merupakan anggota masyarakat yang sejahtera, maka akan sejahteralah masyarakat.

Dalam kehidupan berumah tangga, wajar-wajar saja suami isteri mengalami perselisihan karena berbagai masalah yang mereka hadapi. Sering dikatakan bahwa perselisihan dalam keluarga merupakan bumbu penyedap, asal dapat dikelola dengan baik, perselisihan suami dengan isteri bisa berupa masalah prinsip, perbedaan sikap dan watak yang sudah mendara daging atau karena hanya persoalan-persoalan sepele yang tidak berarti, manakala perselisihan atau konflik dalam rumah tangga tersebut tidak dikelola secara baik, cenderung akan

mengalami percekcoan, dalam rumah tangga dan tidak jarang pada akhirnya berakibat terjadinya perceraian.

Dampak perceraian akan memberikan dampak negatif terhadap pasangan suami isteri. Menurut penelitian di Ottawa bahwa pria maupun wanita akan mengalami depresi dua tahun pertama perceraian. Ternyata pria yang berusia 26-64 tahun telah mengalami perceraian atau perpisahan. Sedangkan wanita hanya 3.5 lebih depresi dibanding mereka yang bertahan dalam pernikahan.<sup>3</sup>

Bagi suami isteri yang belum dapat mengatasi perselisihan rumah tangganya, jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk bercerai harus diingat walaupun perceraian adalah sesuatu yang diharamkan tetapi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt.

Secara umum, alasan terjadinya perceraian yang terjadi dalam masyarakat sangat beragam antara lain disebabkan oleh poligami, krisis akhlak, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin dibawah umur, penganiayaan, cacat biologis, gangguan pihak ketiga maupun tidak ada keharmonisan.

Sehubung dengan hal tersebut maka diperlukan suatu usaha penyuluh tentang perkawinan dan keluarga sejahtera untuk membekali setiap individu agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi guncangan dalam perkawinan. Oleh karena itu, berdirilah BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang beradah dibawah naungan Kemenag RI dengan SK Menag No. 85 tahun 1961.

BP4 merupakan salah satu lembaga yang memberikan bimbingan dan penasehatan kepada keluarga yang bermasalah. BP4 merupakan badan atau lembaga semi resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam

---

<sup>3</sup>Muhammad Ichsan. *Jangan Pernah Bercerai* (Yogyakarta; Ichsan Media,2009).h.14.

meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga.

Untuk sekedar gambaran, kasus-kasus perceraian yang terjadi setiap saat seolah-olah sangat mencerminkan kehidupan rumah tangga Muslim yang ada di Indonesia, misalnya saja di kota Bulukumba pada tahun 2013 angka perceraian mencapai 4,8% kasus yang dikabulkan dan tahun 2014 mencapai 5,35% kasus yang dikabulkan dan pada tahun 2015 mencapai 5,57% kasus yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba, salah satunya daerah yang paling banyak melakukan cerai yaitu Kecamatan Gantarang sebanyak 40,5% kasus yang masuk di Pengadilan Agama Bulukumba, angka perceraian dari tahun-ketahun sungguh sangat memprihatinkan.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut, tujuan pernikahan untuk terbentuknya hidup berkeluarga yang sakinah masih sangat jauh, karena dari tahun ketahun angka perceraian di Kabupaten Bulukumba meningkat.

Disamping itu, berdasarkan data dari BP4 Kecamatan Gantarang bahwa keluarga yang bermasalah yang pernah mengajukan permasalahan ke BP4 dari tahun 2013-2015 ada 5 kasus yang terdaftar tapi hanya 1 kasus yang berhasil didamaikan dan sisanya tidak dapat dimediasi karena tidak adanya dukungan dari pihak keluarga. Angka ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan angka perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Bulukumba. Sementara tugas BP4 adalah memediasikan pasangan yang mengalami perselisihan rumah tangga sebelum diajukan ke Pengadilan Agama<sup>5</sup>. Dengan demikian peran penasehatan BP4 memberikan dampak yang besar terhadap kelestarian keluarga, karena setelah mendapat penasehatan dari BP4 keadaan keluarga yang berkonflik di

---

<sup>4</sup>Portal Layanan Informasi Perkara Peradilan Agama. Situs Resmi Peradilan Agama Se Indonesia. <http://infoperkara.bidilag.net>. (06 April 2016).

<sup>5</sup>Marwa, Petugas BP4 KUA Gantarang, Wawancara, Bulukumba , 23 Mei 2016.



Bulukumba bisa didamaikan dan lebih memahami arti penting kehidupan berkeluarga.

Hal ini terjadi karena masih banyaknya masyarakat Bulukumba khususnya Kecamatan Gantarang tidak mengetahui keberadaan BP4, sehingga apabila mengalami perselisihan dalam rumah tangga mereka tidak ke BP4 untuk mengkonsultasikannya tetapi langsung ke Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan cerai.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran BP4 Sebagai Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah Di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba**  
**B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

#### 1. Fokus Penelitian

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yakni: Peran BP4 Sebagai Mediator Dalam Membina *Keluarga Sakinah Mawaddah, dan Rahmah* Di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan dalam skripsi ini peran merupakan suatu tindakan atau kewenangan lembaga dalam rangka mencapai tujuan baik yang bersifat sosial maupun non sosial.

BP4 ialah singkatan dari Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan yang merupakan organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan Institusi terkait pemerintah maupun Non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Hasil Munas BP4 XV, *Aggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga*, (Yogyakarta; BP4 DIY, 2014).

Mediator merupakan pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian.

Membina dalam KBBI yaitu Bina yang berarti membangun, mendirikan (negara atau sebagainya).<sup>7</sup>

Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unik masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya, tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga.<sup>8</sup> Sedangkan Sakinah dalam bahasa arab artinya tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi serta penuh kasih sayang. Sehingga keluarga sakinah merupakan keluarga yang bahagia lahir dan batin.

*Mawaddah* dalam KBBI yaitu kasih sayang atau membina kasih sayang.

*Rahmah* yang berarti sayang.

Kecamatan Gantarang adalah sebuah kecamatan yang terletak di pinggir kota, Sulawesi Selatan, Indonesia.

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah yang berada didataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng, Lompobattang dengan jumlah penduduk sebanyak 394.757 jiwa ( berdasarkan sensus penduduk 2010 ) yang mempunyai 10 Kecamatan, 24 kelurahan, serta 123 desa.<sup>9</sup>

Setelah kita mengenal pengertian dari setiap kata-perkata yang digunakan dalam judul, maka fokus penelitian didalam skripsi ini adalah: Bagaimana

---

<sup>7</sup>Ebta Setiawan, "Kamus Versi Online". Blog Ebta Setiawan. <http://kbbi.web.id/bina>. (20 April 2016).

<sup>8</sup>Muchlisin Riadi, "Defenisi, Fungsi dan Bentuk Keluarga". Blog Muchlisin Riadi. <http://www.kajianpustaka.com/2012/11/defenisi-fungsi-dan-bentuk-keluarga.html>. (02 April 2016)

<sup>9</sup>Rahmat Talamsyah, "Profil Kabupaten Bulukumba", Blog Rahmat Talamsyah. [www.rachmatalamsyah.com/2012/06/profil-kabupaten-bulukumba.html](http://www.rachmatalamsyah.com/2012/06/profil-kabupaten-bulukumba.html) (10 Mei 2016).

Kendala dan Pendukung Pelaksanaan Tugas-tugas BP4 dalam membina keluarga sakinah serta, Bagaimana efektifitas BP4 sebagai mediator dalam membina keluarga sakinah.

## 2. Deskripsi Fokus

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Urusan Agama (KUA) Gantarang, yang berada di Pinggir kota, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan mengambil batasan objek penelitian dari kalangan Kepala KUA, petugas BP4, serta beberapa masyarakat yang berada di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian yang telah dikemukakan, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Peran BP4 sebagai Mediator dalam Membina keluarga Sakinah di Indonesia.

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka dapat diidentifikasi Submasalah yang hendak dikaji, yaitu

1. Bagaimana Kendala dan Pendukung Pelaksanaan Tugas-tugas BP4 di Kecamatan Gantarang?
2. Bagaimana efektivitas BP4 sebagai mediator dalam membina keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah pada masyarakat Kecamatan Gantarang?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan bagian di mana calon penulis harus mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan dia teliti.

Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil Munas BP4 XV, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga*, 2014 membahas tentang pengertian BP4 sebagai mitra KEMENAG dan institusi terkait pemerintah maupun non pemerintah.
2. Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam*, 2009 membahas tentang perkawinan itu sangat penting bagi ummat manusia yang merupakan sunnah Rasulullah.
3. Mayzan Arif Harsanto dalam skripsinya *Peran Penasehatan BP4 Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tanggah (studi kasus di kelurahan purbayan kotagede Yogyakarta tahun 2007-2009)*, 2009 menerangkan tentang penasehatan yang diberikan oleh BP4 merupakan hal yang berdampak positif dan sangat bermanfaat bagi keluarga yang sedang mengalami permasalahan sedangkan dalam skripsi ini lebih mengacu kepada Kendala dan Pendukung Pelaksanaan Tugas-tugas BP4 di Kecamatan Gantarang dan efektifitas BP4 dalam membina keluarga sakinah mawaddah dan rahmah di kecamatan gantarang<sup>10</sup>.
4. Siti Marhama dalam skripsinya *Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Terjadinya perceraian di Kabupaten Wonosobo*, 2011 menerangkan tentang Faktor penghambat BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian dan upaya BP4 untuk mengatasi hambatan dalam mencegah terjadinya perceraian. Sedangkan dalam skripsi ini lebih mengacu kepada Kendala dan Pendukung Pelaksanaan Tugas-tugas

---

<sup>10</sup>Mayzan Arif Harsanto, ”*Peran Penasehatan BP4 Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tanggah (studi kasus di kelurahan purbayan kotagede Yogyakarta tahun 2007-2009)*”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009).

BP4 di Kecamatan Gantarang dan efektifitas BP4 dalam membina keluarga sakinah mawaddah dan rahmah di kecamatan gantarang<sup>11</sup>.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Untuk mengetahui Kendala dan Pendorong Pelaksanaan Tugas-tugas BP4 di Kecamatan Gantarang
3. Untuk mengetahui efektifitas BP4 sebagai mediator dalam membina keluarga sakinah.

Kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Memberikan wawasan kepada penulis secara pribadi tentang peran BP4 dalam membina keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah* yang berada di Kecamatan Gantarang
2. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai BP4 yang beradiah di KUA.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum.

---

<sup>11</sup>Siti Marhama, “Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Terjadinya perceraian di Kabupaten Wonosobo” Skripsi, (Semarang: Fak. Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2011).

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### **A. Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4)**

##### **1. Pengertian Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4)**

BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan Institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Tujuan BP4 yaitu mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejatera materil dan spirituil<sup>1</sup>

Badan ini telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan jika terjadi perselisihan rumah tangga (perceraian).

Kedudukan BP4 saat ini terpisah dari Pengadilan Agama. Namun, sebelum tahun 1955 antara BP4 dan Pengadilan Agama saling berkaitan, terutama mengenai kewenangan mengeluarkan akta cerai ada di BP4, sehingga BP4 dapat mengetahui jumlah perceraian yang terjadi di wilayah tersebut.

---

<sup>1</sup>Hasil Munas BP4 XV, *Anggaran Dasar Dan Anggaran RumahTangga*,(Yogyakarta;BP4 DIY 2014)

Saat ini BP4 dengan pengadilan agama sudah terpisah dan tidak ada hubungan kordinasi, penerbitan akta cerai merupakan wewenang pengadilan agama.

BP4 berada dalam struktur Departemen Agama, khususnya di bawah Direktur Urusan Agama dan Pembinaan Syariah. Pada Kementerian Agama terdapat BP4 pusat yang membawahi BP4 Tingkat Provinsi, kemudian BP4 tingkat kota, dan lingkup terkecil adalah tingkat kecamatan yang berada di setiap Kantor Urusan Agama (KUA).

## **2. Sejarah BP4 ( Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan )**

BP4 berdiri sebagai bentuk keperhatian dan kepedulian terhadap kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia. Dari berbagai versi disebutkan istilah BP4 pertama lahir di Bandung provinsi Jawa Barat pada hari Ahad, tanggal 3 Oktober 1954 atas inisiatif Arhata (Abdur Rauf Hamidy), almarhum merupakan mantan kepala Kantor Urusan Agama Provinsi Jawa Barat saat itu. Pada hari dan tanggal tersebut musyawarah atau pertemuan yang dihadiri sekitar 100 orang wakil-wakil instansi pemerintah, tokoh masyarakat, para ulama, para pemimpin organisasi sosial Islam dan Nasional. Bertempat di ruang sidang DPRD kota Bandung. Arhata sebagai pemimpin sidang mengemukakan konsep pembentukan organisasi BP4 (badan penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian) yang bertujuan mempertinggi nilai perkawinan dan mewujudkan rumah tangga bahagia, dengan berusaha memberikan nasehat kepada masyarakat yang berkepentingan dalam soal perkawinan.

Selanjutnya disepakati dibentuk organisasi BP4 dengan Arhata sebagai ketua susunan pengurus badan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Pada tanggal 17 September 1956, Menteri Agama K.H. Muhammad Ilyas menerima dan menyambut baik Delegasi BP4 Jawa Barat

yang terdiri dari Arhata, Ny Dunah Pardjaman, dan Ny Theresiah Kamarga menyampaikan hasil-hasil Koperensi BP4 Jawa Barat pertama yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 31 Agustus 1956 di Bandung yang juga dihadiri Gubernur Jawa Barat saat itu Raden Mohammad Sanusi Hardjadinata dan juga H.S.M. Nasaruddin Latif mewakili menteri agama.

P5 (Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) di Jakarta. Pada tanggal 7 Maret 1956 tercatat berdirinya organisasi P5 sejenis dengan BP4 di Jawa Barat. P5 didahului dengan terbentuknya SPP (Seksi Penasehat Perkawinan) tanggal 4 April 1954 atas gagasan H.S.M. Nasaruddin Latif, almarhum Kepala Kantor Urusan Agama di Jakarta Raya atas persetujuan Sekjen Kementerian Agama R.M Kafrawi yang kemudian pada tanggal 7 Maret 1956 yang bertugas mendamaikan perselisihan suami isteri, yaitu mencegah perceraian sepanjang persoalan belum diajukan ke Pengadilan Agama dengan Ketua P5 pertama yaitu Ny S.R. Poedjotomo.

BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga) di Yogyakarta. Pada tanggal 7 Maret 1958 dirintis berdirinya BKRT yang tokohnya antara lain ibu AR. Baswedan, K.H Ahmad Badawi (saat itu Kepala Bagian Ibadah Sosial pada KUA Daerah Istimewah Yogyakarta), K.H Farid Ma'ruf (saat itu Kepala KUA Daerah Istimewah Yogyakarta) yang kemudian menjadi Ketua Umum Pertama BKRT.

BP4 bersifat Nasional. Pada bulan Januari 1960 dalam pertemuan Pengurus BP4 tingkat 1 Se-Jawa disepakati bahwa organisasi-organisasi BP4 yang bersifat lokal akan disatukan menjadi BP4 yang bersifat nasional. Kemudian hasil Komperensi Dinas Departemen Agama ke VII tanggal 25-30 Januari 1961 di Cipayung Jakarta diumumkan berdirinya BP4 Pusat (yang bersifat nasional).



Dalam Anggaran Dasar baru tersebut ditetapkan bahwa organisasi ini berkedudukan di Jakarta dan bertujuan :

- a. Mempertinggi nilai perkawinan.
- b. Mencegah perceraian yang sewenang-wenang.
- c. Mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sejahtera sesuai tuntunan Islam.

Pada tanggal 17 Oktober 1961 sesuai usul pengurus BP4 Pusat No. 1/BP4/61, keluar Surat Keputusan Menteri Agama No. 85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang Penasihatn Perkawinan Dan Pengurangan Perceraian mengenai nikah, talak dan rujuk, dan tanggal 8 Juli 1961, menyusul SK Menteri Agama, hasil Musyawarah antara Kepala Kantor Urusan Agama dengan Pengurus BP4 Jawa Barat dan P5 di Jakarta raya ditetapkan susunan Pengurus BP4 pusat pertama dengan Ketua H. Siswosoedarmo dan dilantik oleh Menteri Agama K.H. Wahid Wahab pada tanggal 20 Oktober 1961.

BP4 sekarang yaitu Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan berdiri secara resmi pada tanggal 3 Januari 1961 di Jakarta berdasarkan SK Menteri Agama RI NO. 85 tahun 1961 yang menetapkan kepengurusan BP4.

Saat ini BP4 Pusat dipimpin oleh Ketua Umum Drs. H. Najib Anwar, MH. Yang dikukuhkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 13 Oktober 2014 di Kementerian Agama Republik Indonesia Jalan lapangan Banteng Barat Jakarta Pusat.<sup>2</sup>

Landasan terbentuknya BP4 yaitu dalam Firman Allah swt. dalam Qs al-Ruum/30: 21.

---

<sup>2</sup>“Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Pelestarian”,  
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan\\_penasihatn\\_pembinaan\\_dan\\_pelestarian\\_perkawinan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_penasihatn_pembinaan_dan_pelestarian_perkawinan). 31 Mei 2016.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kuasa-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>3</sup>

Ketua BP4 dari masa ke masa :

- a. H. Siswosoedarmo (1961-1970) Ketua, K.H. Muh. Sjakir. Penulis I
- b. K.H. Moch Ali Masjhar (1970-1973), Ketua Umum Sjamsuddin Z.D.T,  
Sekretaris I
- c. K.H. Djazuli Wangsasaputra (1977-1976), Ketua Drs. Noerjanto, Sekretaris
- d. K.H. Djazuli Wangsasaputra (1976-1979), Ketua Umum
- e. Drs. H. Amidhan, Sekretaris
- f. Direktur Urais, Ex Officion Ketua Umum (1986-1989), Dra. Hj. Zubaidah  
Muchtar, Sekretaris Umum.
- g. Direktur Urais, Ex Officion Ketua Umum (1986-1989) Drs. H. Imam  
Masykoer Alie, Sekretaris Umum
- h. Dr. H. Ahmad Sutarmadi (1998-2001), Ketua Umum Drs. H. Imam Masykoer  
Alie, Sekretaris Umum.
- i. Drs. H. Imam Masykoer Alie, Ketua Umum.
- j. Drs. H. Masyhur Amin, Ketua Umum
- k. Drs. H. Mukhtar Ilyas, Ketua Umum
- l. Drs. H. Taufiq, S.H., M.H Ketua Umum (2009-2014)
- m. Drs. H. Wahyu Widiana, M.A. Ketua Umum (2014-2019) Drs. H. Najib  
Anwar, M.H. (Sekretaris Umum)

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Indah Press, 1995.

### 3. Visi dan Misi BP4

Adapun Visi dan Misi dari BP4 adalah sebagai berikut:

Visi BP4 adalah mewujudkan Keluarga sakinah, Mawaddah dan Rahmah.

Sedangkan Misi BP4 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi;
- b. Meningkatkan pelayanan kepada keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi.
- c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.<sup>4</sup>

### 4. Tujuan BP4 ( Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan )

Tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spiritual dengan :

- a. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.
- b. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.
- d. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga
- e. Mengembangkan jaringan kemitraan dan instansi/lembaga yang memiliki visi dan misi dan tujuan yang sama.

---

<sup>4</sup>Hasil Munas BP4 XIV/2009, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga*, (Jakarta; 1 – 3 Juni 2009), h. 14.

## **5. Usaha dan Upaya BP4 ( Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan )**

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan 5, BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut<sup>5</sup> :

- a. Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatian, dan konsultasi/konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun berkelompok secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik.
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Peradilan Agama;
- e. Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
- f. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
- g. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media massa dan media elektronik yang dianggap perlu;
- h. Menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
- i. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;

---

<sup>5</sup>Hasil Munas BP4 XV, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga*, (Yogyakarta;BP4 DIY 2014), h. 6.

- j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
- k. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan;
- l. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

#### **6. Fungsi BP4**

Lembaga BP4 adalah lembaga yang berusaha memberikan pelayanan terhadap persoalan keluarga sebagai mitra Kementerian Agama. Berdasarkan Musda ke XIII Tahun 2006 yang berikut : memberikan bimbingan pernikahan dengan menyelenggarakan kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, memberikan pendidikan pra nikah dan pasca nikah.<sup>6</sup>

##### **a. Menyelenggarakan kursus calon pengantin**

Perkawinan dalam agama Islam adalah sunnah Rasulullah saw. maka ketentuan tentang perkawinan diatur dalam undang-undang. Tujuan perkawinan tentunya ingin membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah. Agar apa yang diharapkan suami isteri atau calon pengantin dapat dicapai, maka perlu adanya pengarahan dan perbekalan sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Di lembaga inilah masyarakat dapat berkonsultasi tentang masalah yang berkaitan tentang perkawinan baik pra nikah atau pasca nikah melalui kursus calon pengantin.

##### **b. Mengembangkan pembinaan keluarga sakinah**

Para pasangan suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya berjalan lancar tanpa ada rintangan, kadangkala badai menerpa sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Misalnya perselingkuhan, ketidakadilan, cemburu buta, poligami dan lain-lain.

---

<sup>6</sup>Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/542/tahun 2013 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. KUA Kec. Gantarang

Hal ini jika tidak dapat diatasi akan mengarah pada perceraian. Untuk mengatasi hal tersebut lembaga BP4 dapat membantu solusi atas keresahan rumah tangga tersebut. Salah satunya dengan mengadakan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)

c. Memberikan pendidikan pra nikah dan packa nikah

Para pemuda dan pemudi yang belum melangsungkan pernikahan perlu kiranya untuk mendapat pengetahuan tentang pernikahan sejak mereka masih duduk di bangku sekolah SLTP atau SLTA. Pembinaan pasca nikah ini ditujukan pada keluarga yang berusia di bawah 17 tahun. Karena pernikahan dibawah usia 17 tahun masih rentan sekali mendapat cobaan-cobaan dalam kehidupan rumah tangganya sehingga dirasa masih perlu mendapat pembinaan.

## B. Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah

### 1. Pengertian Keluarga

Dalam bahasa arab keluarga diistilahkan dengan *al-ahlu* jamaknya *ahlunan* dan *ahal* yang memiliki arti famili, keluarga dan kerabat<sup>7</sup>, seperti dalam QS Thaha/20: 132.

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

Terjemahnya:

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga DiDunia Islam*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2004), h. 15.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Indah Press, 1995.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia keluarga adalah ibu, bapak, dan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Menurut Abu Zahra bahwa institusi keluarga mencakup suami, isteri, anak-anak dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara kandung, dan anak-anak mereka dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (sepupu).<sup>9</sup>

Menurut psikologi, keluarga biasa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling memengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai sejahtera, dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Dalam Islam keluarga adalah inti masyarakat. Islam cenderung memandang keluarga sebagai suatu yang mutlak. Dalam al-Qur'an terdapat beberapa kalimat yang mengarah pada keluarga. *Ahlul bait* disebut keluarga rumah tangga Rasulullah saw. Keluarga perlu dijaga sesuai firman Allah dalam QS al-Tahrim/66: 6.

---

<sup>9</sup>Andi Syahrani, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013).h. 4-5.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  
يُؤْمَرُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>10</sup>

Keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang. Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun atas perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/isteri dan anak. Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga merupakan perjanjian sakral (*mitsaqan ghalidha*) antara suami isteri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.

Pandangan masyarakat tentang keluarga bahwa keluarga merupakan lambang kehormatan bagi seseorang karena telah memilih pasangan yang sah dan hidup wajar sebagaimana umumnya dilakukan oleh masyarakat, kendatipun sesungguhnya menikah merupakan pilihan bukan sebuah kewajiban yang berlaku umum untuk semua individu.

## 2. Fungsi Keluarga

Ada beberapa fungsi keluarga yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

### a. Fungsi pendidikan

Dalam hal ini tugas keluarga adalah mendidik dan menyekolahkan anak untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa depan anak bila kelak dewasa.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: CV Indah Press, 1995.

<sup>11</sup>Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (studi Terhadap pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*. (Cet. I; Jakarta: Kementrian Agama RI. 2011).h. 21.



b. Fungsi Sosialisasi

Tugas keluarga dalam menjalankan fungsi ini adalah bagaimana keluarga mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.

c. Fungsi Religius

Tugas keluarga dalam fungsi ini adalah memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menyakinkan bahwa ada kehidupan lain setelah dunia.

d. Fungsi Perlindungan

Tugas keluarga dalam fungsi ini adalah melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik sehingga anggota keluarga merasa terlindungi dan merasa aman.

e. Fungsi ekonomi

Tugas keluarga dalam fungsi ini adalah untuk mencari sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

f. Fungsi Lingkungan

Dimana diharapkan keluarga dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat sekitar dan alam.

### 3. Pengertian Keluarga Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah

Keluarga sakinah sering diidentikkan dengan keluarga bahagia atau keluarga sejahtera yakni suatu sosok keluarga yang di pandang ideal oleh masyarakat. Al Gazali memberikan kriteria keluarga sakinah sebagai suatu keluarga yang memenuhi lima hal dasar (*alkulliyat al-khams*) yakni terpenuhinya kebutuhan keselamatan jiwa raga dan keturunan, terpenuhinya kebutuhan akal dan

pikiran, terpenuhinya kebutuhan harta benda, terpenuhinya kebutuhan nasab dan keturunan, terpenuhinya kebutuhan agama.<sup>12</sup>

Sementara itu, Dirjen Bimas Islam dan Urusan haji Departemen Agama dalam keputusannya tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah merumuskan pengertian keluarga sakinah sebagai keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan yang selaras, serasi, serta, mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.<sup>13</sup>

Pengertian keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dapat dijelaskan sebagai berikut: keluarga yang dibangun dengan niat yang matang berdasar atas apa yang tertulis dalam Al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah Muhammad saw. Yaitu keluarga yang saling mencintai dan mengasihi, penuh pengertian, dan selalu mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan dan hanya mengharap ridho Allah semata.

Setiap pasangan suami isteri yang telah memasuki gerbang kehidupan rumah tangga, tentu bermaksud membentuk keluarga bahagia, sejahtera lahir batin. Tujuan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai dan kekal berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa. Kemudian dari keluarga seperti ini kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai, adil, dan makmur.

---

<sup>12</sup>Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat* (Cet.I; Makassar: Indobis, 2006).h. 224.

<sup>13</sup>Departemen Agama R.I. Direktur Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta, 2001.

Istilah *sakinah* digunakan al-Qur'an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini mempunyai akar kata yang sama dengan *sakanun* yang berarti tempat tinggal. Bisa disimpulkan bahwa istilah tersebut digunakan al-Qur'an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (*mawaddah warahmah*) antara sesama anggota keluarganya.

Lebih lanjut dapat dipahami pengertian masing-masing kata keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan ahlaqul karimah.<sup>14</sup>

*Mawaddah* berasal dari kata *al-waddu* (cinta) atau mencintai sesuatu,<sup>15</sup> *mawaddah* menurut bahasa berarti cinta atau harapan. Dalam sebuah pernikahan, cinta adalah hal penting yang harus ada dan selalu ada pada sebuah pasangan suami istri. *Mawaddah* juga berarti selalu mencintai, baik dikala senang maupun susah.

*Rahmah* memiliki kata dasar yaitu *Rahmah* yang berarti kasih sayang. Jika digabungkan arti keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* berarti keluarga yang selalu diberikan kedamaian, ketentraman, penuh cinta, dan kasih sayang. Pasti semua keluarga mendambakan ingin menjadi keluarga yang seperti itu. Kunci utama untuk mendapatkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*,

---

<sup>14</sup>Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No : DJ.II/542 Tahun 2013. h. 1.

<sup>15</sup>Raghib Asfahany, *Musfradat Alfadh al-Qur'an* (Damasyiq: Darussalam, t.th) Juz 2, h. 499.

adalah meluruskan niat kita berkeluarga karena ingin mendapat ridho dari Allah swt. Banyak orang yang berkeluarga dengan niat yang kurang lurus, sehingga keluarga yang dibina akan menjadi keluarga yang kurang harmonis atau bahagia.

Allah swt telah memberikan seperangkat aturan yang lengkap untuk digunakan manusia dalam sebuah aspek kehidupannya. Islam telah memberikan gambaran yang paling indah mengenai keluarga yang bahagia. Dalam islam keluarga dibangun sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh syariat, yakni dalam rangka beribadah kepada Allah swt, menjaga kehormatan, melahirkan keturunan, dan mempererat silaturahmi.

### **C. Ciri-ciri Dan Kreteria Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah**

Pada dasarnya, keluarga sakinah sukar diukur karena merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh pasangan yang berumahtangga. Namun, terdapat beberapa ciri-ciri keluarga sakinah, diantaranya<sup>16</sup> :

#### **1. Rumah Tangga didirikan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah**

Asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpandukan Al-Quran dan sunnah dan bukannya atas dasar cinta semata-mata. Ia menjadi panduan kepada suami isterinya sekiranya menghadapi berbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumahtangga.

Firman Allah swt dalam QS. An-Nisa/4 :59.

وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ.....

Terjemahnya:

“Kemudian jika kamu berselisih faham/pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasulullah (Sunnah)”<sup>17</sup>.

<sup>16</sup>Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Alauddin University Press, Makassar, 2013,.h.147-154

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Indah Press, 1995.

## 2. Rumah Tangga yang Berasaskan Kasih Sayang (mawaddah Warahmah)

Tanpa '*al-mawaddah*' dan '*al-Rahmah*', masyarakat tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman terutamanya dalam institusi kekeluargaan. Dua perkara ini sangat-sangat diperlukan karena sifat kasih sayang yang wujud dalam sebuah rumah tangga dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bahagia, saling menghormati, saling mempercayai dan tolong menolong. Tanpa kasih sayang, perkawinan akan hancur dan kebahagiaan hanya akan menjadi angan-angan saja.

## 3. Mengetahui Peraturan Berumah Tangga

Setiap keluarga seharusnya mempunyai peraturan yang patut dipatuhi setiap ahlinya yang mana seorang isteri wajib taat kepada suami dengan tidak keluar rumah melainkan setelah dapat izin, tidak menyanggah pendapat suami walaupun si isteri merasakan dirinya betul selama suami tidak melanggar syariat, dan tidak menceritakan hal rumahtangganya kepada orang lain. Anak pula wajib taat kepada kedua orangtuanya selama perintah keduanya tidak bertentangan dengan larangan Allah.

Lain pula peranan sebagai seorang suami. Suami merupakan ketua keluarga dan mempunyai tanggung jawab memastikan setaip ahli keluarganya untuk mematuhi peraturan dan memainkan peranan masing-masing dalam keluarga supaya sebuah keluarga sakinah dapat dibentuk.

Firman Allah swt dalam QS. An-Nisa/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.<sup>18</sup>

#### 4. Menghormati dan Mengasihi Kedua Ibu Bapak

Perkawinan bukanlah semata-mata menghubungkan antara kehidupan kedua pasangan tetapi ia juga melibatkan seluruh kehidupan keluarga kedua belah pihak, terutamanya hubungan terhadap ibu bapak kedua pasangan. Oleh karena itu, pasangan yang ingin membina sebuah keluarga sakinah seharusnya tidak menepikan ibu bapak dalam urusan pemilihan jodoh, terutamah anak lelaki. Anak lelaki perlu mendapat restu dari kedua ibu bapaknya karena perkawinan akan memutuskan tanggungjawab terhadap kedua ibu bapaknya. Selain itu, pasangan juga perlu mengasihi ibu bapak supaya mendapat keberkatan untuk mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga.

#### 5. Menjaga Hubungan Kerabat dan Ipar

Antara tujuan ikatan perkawinan ialah untuk menyambung hubungan keluarga kedua belah pihak termasuk saudara ipar kedua belah pihak dan kerabat-kerabatnya. Karena biasanya masalah seperti perceraian timbul disebabkan kerenggangan hubungan dengan kerabat dan ipar.

---

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Indah Press, 1995.

Dalam program pembinaan keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria (Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah sesuai dengan SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 Pasal 4) antara lain :<sup>19</sup>

- a. Keluarga Pra Sakinah, yaitu Keluarga yang terbentuk melalui pernikahan sah , tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan materiil (*basic-needs*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat, puasa, sadang, pangan, papan, dan kesehatan;
- b. Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan materiil secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya;
- c. Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga-keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya dan juga mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dengan lingkungannya. Tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia; infak, wakaf, amal jariyah, menabung dan sebagainya;
- d. Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, dan sosial psikologis, serta pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri teladan bagi lingkungannya;
- e. Keluarga Sakinah III plus, yaitu keluarga yang telah memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia secara sempurna, kebutuhan sosial psikologi, dan pengembangannya, serta dapat menjadi suri teladan bagi lingkungannya;

---

<sup>19</sup>Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta; Pustaka Pesantren, 2004.h.

#### **D. Cara Membangun Keluarga Sakinah**

Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata upaya mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah yang perkara yang mudah, ditengah-tengah arus kehidupan seperti ini, jangan untuk mencapai bentuk keluarga yang ideal, bahkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan suatu prestasi tersendiri, sehingga sudah saatnya setiap keluarga perlu merenung apakah mereka tengah berjalan pada koridor yang diinginkan oleh Allah dalam mahligai tersebut ataupun mereka justru berjalan bertolak belakang dengan apa yang diinginkan olehNya.

Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga, kerana keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berperang sebagai suatu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat.

Al-Qur'an merupakan landasan dari terbangunnya keluarga sakinah, dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam keluarga dan masyarakat. Menurut hadis nabi ada lima pilar keluarga sakinah yaitu :<sup>20</sup>

1. Memiliki kecenderungan kepada agama
2. Saling menghormati dan menyayangi
3. Sederhana dalam belanja
4. Santun dalam bergaul
5. Selalu intetropeksi.

Sedangkan cara membangun keluarga sakinah yaitu :<sup>21</sup>

1. Memiliki Krateria Calon Suami Atau Isteri Dengan Tepat

---

<sup>20</sup>Abiummi "Meraih Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah", Blog Abiummi, <https://abiummi.com/meraih-keluarga-sakinah-mawaddah-warahmah/> 15 September 2016

<sup>21</sup>Fimadani, "Bagaimana Membangun Keluarga Sakinah?", Blog Fimadani. [www.fimadani.com/bagaimana-membangun-keluarga-sakinah/](http://www.fimadani.com/bagaimana-membangun-keluarga-sakinah/). Diakses pada 15 September 2016



Agar terciptanya keluarga sakinah, maka dalam menentukan kriteria suami maupun isteri haruslah tepat, diantara kriteria tersebut misalnya beragama islam dan shaleh maupun shaleha : berasal dari keturunan baik-baik, berahlak mulia, sopan santun dan bertutur kata yang baik, mempunyai kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga (bagi suami)

## 2. Dalam Keluarga Harus Ada Mawaddah dan Rahmah

Dengan adanya mawaddah wa rahmah dalam keluarga dapat memberikan keluarga itu tentram, damai dan jauh dari perselisihan. Rasa damai dan tentram hanya dapat dicapai dengan mencintai satu sama lain (pasangan suami isteri).

Dalam QS. Ar-Ruum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>22</sup>

## 3. Saling Mengerti Antara Suami Isteri

Seorang suami atau isteri harus tahu latar belakang pribadi masing-masing. Karena pengetahuan terhadap latar belakang pribadi masing-masing adalah sebagai dasar untuk menjalin komunikasi masing-masing. Dan dari sinilah seorang suami atau isteri tidak akan memaksakan egonya. Banyak keluarga hancur disebabkan oleh sifat egonya. Ini artinya seorang suami tetap bertahan dengan keinginannya dan begitu pula isteri. Seorang suami atau isteri hendaklah mengetahui hal-hal sebagai berikut :

### a. Perjalanan hidup masing-masing

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Indah Press, 1995.

- b. Adat istiadat daerah masing-masing (jika suami isteri berbeda suku dan daerah)
- c. Kebiasaan masing-masing
- d. Selera, kesukaan atau hobi
- e. Pendidikan
- f. Karakter/sifat pribadi secara profesional (baik dari masing-masing, maupun dari orang-orang terdekat, seperti orang tua, teman ataupun saudaranya, dan yang relevan dengan ketentuan yang dibenarkan syari'at islam)

#### 4. Saling Menerima, Menghargai, dan Mempercayai

Suami isteri harus saling menerima satu sama lain. Suami isteri itu ibarat satu tubuh dua nyawa. Tidak salah kiranya suami suka warna merah dan istri suka putih, tidak perlu ada penolakan. Dengan kerendahan dan saling pengertian, jika warna merah dicampur warna putih maka akan terlihat keindahannya.

Dalam keluarga suami isteri hendaknya saling menghargai perkataan dan perbuatan masing-masing, bakat dan keinginan masing-masing, menghargai keluarga masing-masing. Dengan adanya sikap menghargai maka tidak terjadi perselisihan satu sama lain.

Dalam rumah tangga seorang isteri harus percaya kepada suaminya, begitu pula dengan suami terhadap isterinya ketika ia sedang berada di luar rumah. Jika diantara keduanya tidak ada saling percaya, kelangsungan hidup rumah tangga berjalan tidak seperti yang dicita-citakan yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Akan tetapi jika suami isteri saling mempercayai, maka kemerdekaan dan kemajuan akan meningkat, serta hal ini merupakan amanah Allah.

#### 5. Suami Isteri Harus Menjalankan Kewajibannya Masing-masing

Suami mempunyai kewajiban mencari nafka untuk menghidupi keluarganya, tetapi disamping itu ia juga berfungsi sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dalam rumah tangga dalam Qs. An-Nisa/4: 34.

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ .....

Terjemahnya :

Kaum Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian dari mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lainnya (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.<sup>23</sup>

Menikah bukan hanya masalah mampu mencari uang, walaupun ini juga penting, tapi bukan salah satu yang terpenting. Suami bekerja banting tulang memeras keringat untuk mencari rezki yang halal tetapi ternyata tidak mampu menjadi pemimpin bagi keluarganya.

Isteri mempunyai kewajiban taat kepada suaminya, mendidik anak dan menjaga kehormatannya (jilbab, khalwat, tabaruj, dan lain-lain). Ketaatan yang dituntut seorang isteri bukan tanpa alasan. Suami sebagai pemimpin, bertanggung jawab langsung menghadapi keluarga, melindungi keluarga dan menjaga keselamatan lahir batin, dunia akhirat. Ketaatan isteri pada suami dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah jalan menuju surga di dunia dan akhirat. Isteri boleh membangkang kepada suaminya jika perintah suaminya bertentangan dengan hukum Syari'at islam, misalnya disuruh berjudi, dilarang berjilbab, dan lain-lain.

#### 6. Suami Istri Harus Menghindari Pertikain

Pertikain adalah salah satu penyebab retaknya keharmonisan keluarga, bahkan apabila pertikaian tersebut terus berkesinambungan maka dapat menyebabkan perceraian. Sehingga baik suami maupun isteri harus dapat menghindari masalah-masalah dapat menyebabkan pertikaian karena suami dan isteri adalah faktor paling utama dalam menentukan kondisi keluarga.

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Indah Press, 1995.


### 7. Hubungan Antara Suami Istri Harus Atas Dasar Saling Membutuhkan

Seperti pakain dan yang memakainya, yaitu menutup aurat melindungi diri dari panas dingin, dan sebagi perhiasan. Suami terhadap isteri dan begitu sebaliknya harus mengfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Jika isteri mempunyai suatu kekurangan, suami tidak menceritakan kepada orang lain, begitu pula sebaliknya. Jika isteri sakit, suami segera mencari obat atau membawanya ke dokter, begitu juga sebaliknya. Isteri harus selalu tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan isteri.

### 8. Suami Harus Senantiasa Menjaga Makanan Yang Halal

Suami dalam mencari nafkah harus dengan yang halal karena Allah menekankan perintah pentingnya memakan makanan yang halal untuk kebaikan mereka. Allah memerintahkan memakan makanan halal seperti dalam QS. Al-Mukminun/23 : 51.

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ



Terjemahnya :

Hai Rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shaleh, sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>24</sup>

### 9. Suami harus menjaga Aqidah Yang Benar

Aqidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun. Bimbingan dukun dan sebangsanya bukan saja membuat langka hidup tidak rasional tetapi juga bisa menyesatkan pada bencana yang fatal.

Membina suatu keluarga yang bahagia memang sangat sulit. Akan tetapi jika masing-masing pasangan mengerti konsep-konsep keluarga sakinah seperti

---

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Indah Press, 1995.

yang telah diuraikan diatas, Insya Allah cita-cita membentuk keluarga bahagia dan kekal dalam aturan syari'at islam, yang disebutkan Rumahku adalah surgaku akan terwujud. Menurut Syekh Muhammad Abdul “manusia hidup menurut akidahnya, bila aqidah benar maka benar pula ia hidupnya dan aqidah itu bisa betul apabila orang yang mempelajarinya dengan cara betul pula.

#### **E. Dasar-Dasar Pembinaan Rumah Tangga Sakinah**

Islam membangun fondasi rumah tangga yang sakinah, mengikat dengan asas yang kuat dan sangat kokoh sehingga menganggapai awan dan bintang-bintang. Jika bintang-bintang adalah sebuah perhiasan langit, maka rumah tangguh adalah perhiasan sebuah masyarakat.<sup>25</sup>

Islam telah menentukan bangunan bagi sebuah rumah tangga ideal dengan dasar-dasar yang istimewa dan permanen sehingga tidak ada seorang ahli bangunan pun yang mampu menyamainya. Untuk itu keistimewaan ketentuan hukum Islam bagi suami isteri demi terciptanya sebuah bangunan yang kokoh sehingga tidak tergoncang oleh kerasnya kehidupan. Salah satu syarat lain yang tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah* adalah mempertimbangkan usia orang yang menikah. Apakah ia sudah siap atau belum untuk menikah. Karena hal ini akan memberikan dampak yang sangat besar dalam menentukan pola hidup yang selanjutnya akan bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Selain kemungkinan-kemungkinan diatas, untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah banyak jalan yang harus ditempuh antara lain ;

1. Memilih calon isteri yang baik
2. Memilih calon suami yang baik

---

<sup>25</sup>Abdul Hamid Kisyyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2005,h. 20.

### 3. Perkawinan yang baik

Harus memilih calon isteri yang baik, karena isteri adalah tempat berteduh bagi suami dan sebagai teman hidup, pengatur rumah tangga, sebagai ibi dari anak-anak, sebagai tempat menyampaikan isi hati. Isteri yang baik akan mendatangkan kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga.

Setelah ada calon isteri yang baik dan calon suami yang baik maka cara melangsungkan perkawinan pun harus baik pula. Perkawinan yang baik adalah salah satu jembatan untuk menuju rumah tangga yang baik.

### **F. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Islam**

Mempunyai keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah dambaan setiap insan, baik yang akan maupun yang tengah membangun rumah tangga. Faktanya menunjukkan bahwa banyak orang yang merindukan rumah tangga menjadi suatu yang teramat indah, bahagia, penuh dengan berkah. Namun, fakta juga membuktikan tidak sedikit keluarga yang hari demi harinya hanyalah kecemasan, kegelisahan dan penderitaan bahkan tidak jarang diakhiri dengan pertengkaran, perceraian dan juga penderitaan.<sup>26</sup>

Ada ungkapan Rasulullah saw *“Baitii Jannatii”* yang berarti rumahku adalah surgaku. Merupakan ungkapan yang tepat tentang bangunan rumah tangga dimana dalam pembangunannya mesti dilandasi fondasi kokoh berupa iman.

Merindukan suatu keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah itu tidak asal jadi, yang hanya bermodalkan cinta saja, tetapi dibutuhkan kesungguhan, keyakinan, keberanian serta dibutuhkan kerja keras dan kemauan yang keras untuk mewujudkannya.

Ada beberapa cara untuk menjadi keluarga bahagia antara lain:<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmad Zakie, *Peran BP4 dan Tim Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah (Studi Kasus KUA Bekasi Barat dan PA Bekasi)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, h. 36-37.

<sup>27</sup> A. Fatih Syudud, *Keluarga Sakinah, Cara Membina Rumah Tangga harmonis, Bahagia dan Berkualitas*, Malang; Pustaka Al-Khoiroh, 2013.

1. Menjadikan keluarga yang ahli ibadah, keluarga yang taat kepada Allah swt, keluarga yang menghiasi dirinya dengan selalu berzikir kepadaNya dan keluarga yang selalu rindu untuk mengutuhkannya kemuliaan hidup didunia, terutama mengutuhkannya kemuliaan dihadapan Allah swt kelak disurga. Yang menjadikan tempat berkumpulnya keluarga disurga sebagai motifasi dalam meningkatkan amal ibadah.

2. Menjadikan rumah tangga sebagai pusat ilmu.

Pupuk iman adalah ilmu. Memiliki harta tapi kurang ilmu menjadikan kita sama saja tidak mempunyai iman. Harta yang digunakan akan habis tapi ilmu yang digunakan tidak akan habis bahkan akan berlimpah. Pastikan keluarga kita sungguh-sungguh mempunyai ilmu baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, bekali anak kita sejak kecil dengan ilmu dan jadilah orang tua yang senangtiasa menjadi sumber ilmu bagi anak-anaknya.

3. Menjadikan rumah sebagai pusat nasihat, kita harus tau persis semakin hari semakin banyak yang kita harus lakukan, untuk itu kita butuh orang lain agar bisa saling melengkapi kekurangan, guna memperbaiki kesalahan kita. Apabila sebuah rumah tangga mulai saling menasehati, maka keluarga bagaikan cermin yang akan membuat anggota keluarganya berpenampilan lebih baik dan lebih baik lagi. Karena tidak ada koreksi yang lebih baik dari pada koreksi dari keluarga.

4. Menjadikan rumah sebagai pusat kemuliaan, pastikan keluarga kita sebagai contoh bagi keluarga lain. Berbahagialah jika keluarga kita dijadikan contoh teladan bagi keluarga lain, itu berarti masing-masing anggota keluarga senantiasa menuai pahala dari setiap orang yang berubah karena kita sebagai jalan kebbaikannya, saling berlomba-lombalah dalam memunculkan kemuliaan dikeluarga agar terciptanya *keluarga sakinah mawaddah warahmah*

Salah satu syari'at yang Allah swt berikan kepada umatnya adalah diturunkannya syariat pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang halal dan diharapkan dapat menciptakan generasi yang rabbani. sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. Al-Nisa/4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya :

“Hai sekalian Manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silahturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>28</sup>

Tentunya ada banyak hikmah dan kebahagiaan yang didapat ketika Allah swt. mensyariatkan pernikahan kepada umatnya, yang disifatkan didalam al-Qur'an dengan *Miitsaaqan Galiidzan* (tali ikatan yang berat). Dimana pernikahan itu tidaklah hanya sebagai pemenuhan atau penyaluran seksual secara halal namun ada pula tujuan yang lebih agung dari pada itu. Dari sebuah ikatan pernikahan diharapkan juga dapat menciptakan keluarga yang berbibit kan ketenangan dan sakinah, berbuah cinta kasih dan sayang dan mawaddah, diertakan pula dengan kasih sayang dan rahmah dari keduanya.

Menurut M. Quraish Shihab konsep keluarga sakinah menurut islam adalah keluarga yang tenang, penuh kasih sayang. Selanjutnya dalam konsep M. Quraish Shihab dijelaskan dengan modal sakinah dapat melahirkan mawaddah dan rahmah. Untuk mencapai mawaddah ada tiga yang harus dicapai yaitu, perhatian, tanggung jawab, dan penghormatan. Selain itu agar perkawinan menjadi

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Indah Press, 1995.



langgeng yang lagi diwarnai sakinah, konsep ini mengajurkan kesetaraan, musyawarah, kesadaran akan kebutuhan pasangan sehingga masing-masing memiliki.<sup>29</sup>

### **G. Bekal Merai Rumah Tangga Sakinah**

Untuk meraih bekal keluarga yang sakinah diperlukan beberapa ketentuan sebagai berikut :<sup>30</sup>

#### **1. Agama**

Agama adalah dasar utama kebahagiaan suami isteri seperti dijelaskan dalam petunjuk Nabi saw, ia menjadi tolak ukur pertama dan utama dalam memilih pasangan.

Kesalihan seorang wanita tidak akan terwujud kecuali melalui ketaatan dalam menjalankan agama. Selain itu juga diantara hikma Allah swt bagi hamba-hambaNya adalah dia menjadikan rasa cinta dan kasih sayang antara dan isteri sejak awal penciptaan-Nya. Dengan ini, ketenangan antara suami isteri dapat tercapai dengan ketenangan, mawaddah dan rahmah keharmonisan antara suami isteri dapat terwujud. Karena itu kesalihan, ketakwaan dan akhlak mulai harus jadi tolak ukur dalam memilih suami atau isteri. Siapa yang berjalan diatas petunjuk islam, ia akan dibimbing dan diberi petunjuk ke jalan lurus. Siapa yang pilihannya didasarkan bukan pada dasar tersebut diatas, seperti harta, kecantikan, jabatan dan ingin dikenal, tanpa peduli akan agamanya, maka dia tidak akan hidup bahagia dalam keluarganya.

#### **2. Dapat dipercaya (Amanah)**

---

<sup>29</sup>Banjarwangi.com/blog/2015/08/25/konsep-keluarga-sakinah-menurut-islam-dan-pembahasan-lengkap-/ (23 April 2016).

<sup>30</sup>Abdul Aziz bin Nashir Su'ud Al-Abdillah, *Kado Terindah Sang Pengantin*, Pustaka Hikmah, Jakarta, 2008, h. 80.

Amanah adalah sifat yang tertanam didalam jiwa, yang mendorong seseorang untuk menjaga amanah-amanah agama, jiwa, dan agamanya<sup>31</sup>. Jika seorang hambah tidak menjalankan amanahnya maka Setiap orang hendaknya menyadari dalam hati bahwa sesungguhnya Allah melihatnya dan tidak pernah mengantuk dan tidur.

Dengan amanah, saling percaya antara suami isteri dapat terjalin. Percaya adalah ketenangan jiwa dan rohani. Apabila sifat amanah sudah tertanam dalam diri suami isteri, keduanya akan makin bahagia, keluarganya memiliki kedudukan tinggi, keturunannya shalih dan kebahagiaan abadi dapat terwujud

### 3. Ikhlas

Ikhlas adalah salah satu karakteristik orang-orang shidiq (yang benar-benar beriman, jujur) dengan ikhlas, kehidupan rumah tangga terhindar dari manipulasi dan kemunafikan. Ikhlas dapat membuat hubungan antara suami isteri menjadi suci dan harmonis dalam menghadapi berbagai macam perkara dan meletakkan segala persoalan pada tempat yang tepat. Ia senantiasa berusaha menyelesaikan berusa menyelesaikan berbagai macam persoalan tanpa manipulasi, pura-pura atau sandiwara.

Apabila keikhlasan telah tertanam dalam diri setiap suami dan isteri, keluarga akan terbebas dari segala sesuatu yang dapat menghancurkan keluarganya.

### 4. Akhlaq yang mulia

Akhlak mulia termasuk sifat yang terpuji, baik dalam bertutur kata, berbuat dan berperilaku, lemah lembut antara suami isteri, jauh dari sifat angkuh, keras kepala dan sombong. Dengan mempunyai akhlak yang mulia membuat keluarga menjadi sakinah, mawaddah warahmah.

---

<sup>31</sup>M. Sayyid Muhammad Az-za'Balawi, *Pendidikan Remaja Antara Islam dan Ilmu Jiwa*, Depok; Gema Insani, 2007.

Allah swt berfirman dalam QS. Al-Qalam/68: 4.

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

Terjemahnya :

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.<sup>32</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia merupakan tingkatan tertinggi seluruh keutamaan dan kemuliaan. Apabila sifat tersebut telah terbentuk pada diri suami dan isteri, maka kebahagiaan keduanya akan terasa, demikian pula keselamatan didunia dan akhirat.

#### 5. Sama-sama suka

Laki-laki atau perempuan tidak boleh dipaksa menikah dengan orang tertentu. Namun, masing-masing harus dinikahkan berdasarkan pilihannya sendiri yang ia sukai. Semua itu dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang ada, merasa puas dengan pilihannya dengan melihat dan menanyakan tentangnya. Jika tidak, maka pernikahan tersebut bisa berakhir dengan kegagalan.

Setiap laki-laki atau perempuan harus memilih pasangan hidupnya sesuai dengan kriteria yang diinginkannya. Setelah adanya ikatan batin antara dengan yang lainnya. Hal itu terjadi setelah laki-laki melihat perempuan yang ingin dinikahnya.

### H. Problematika Yang Muncul Dalam Keluarga

Dalam rumah tangga biasanya terjadi berbagai konflik misalnya sebagai berikut :<sup>33</sup>

#### 1. Cemburu

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Indah Press, 1995.

<sup>33</sup>Dalam [islam.com/hukum-islam/pernikahan/konflik-dalam-keluarga](http://islam.com/hukum-islam/pernikahan/konflik-dalam-keluarga). 20 Februari 2017

Cemburu merupakan perasaan tidak senang terhadap hal yang dilakukan oleh seseorang yang dicintai karena dinilai mengabaikan kepentingan dirinya. Semua orang akan menaruh apabila dimilikinya itu akan diambil atau dirampas orang.

Cemburu bisa juga menjadi faktor pencetus permusuhan antara suami isteri. Karena itu, suami atau isteri harus dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang menimbulkan kecemburuan, baik berupa ucapan perbuatan dan sebagainya.

## 2. Ekonomi

Tidaklah berlebihan bahwa kelancaran rumah tangga sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Segala kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi jika ekonominya lancar tapi sebaliknya kericuhan rumah tangga sering terjadi yang kadang-kadang diakhiri oleh perceraian, ini disebabkan oleh masalah ekonomi yang tidak stabil.

Kestabilan ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah. Kondisi keuangan sebuah keluarga bisa dikatakan stabil apabila terdapat keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran.

## 3. Selingkuh

Didalam kehidupan perkawinan, perselingkuhan merupakan sumber kehancuran sebuah keluarga. Kehadiran orang ketiga dalam perkawinan menjadi insiden penyebab paling besar. Perselingkuhan bukan masalah sederhana, apabila terjadi perselingkuhan dalam suatu keluarga maka rumah tangga yang dibina akan hancur karena keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu bangsa, kalau keluarga itu bahagia dan sejahtera maka bahagialah suatu bangsa itu, tapi kalau keluarga tersebut hancur, maka hancur pula bangsa itu.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>1</sup>

##### 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Adapun pemilihan lokasi penelitian ini karena tingginya tingkat perceraian di Bulukumba.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis *syar'i* yaitu pendekatan yang memperhatikan tata aturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang BP4 berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang penasehatan perkawinan.

#### **C. Sumber Data**

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang dilakukan.

---

<sup>1</sup>Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.5.

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya<sup>2</sup>. Data ini juga diperoleh dari dokumentasi yang dimiliki dari Kantor Urusan Agama sesuai bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Setelah data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya dilakukan inventarisasi data, pengolahan data, dan analisis data.

Sumber data yang diperoleh yakni berupa data primer yang dimana sejumlah responden yang disebut Narasumber Penelitian. Narasumber ini diambil dengan cara tertentu dari para pihak yang kedudukannya atau kemampuannya dianggap dapat mempresentasikan masalah yang dijadikan objek penelitian.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

##### **1. Penelitian Pustaka (*library research*)**

Yaitu penelitian yang menghimpun data atau informasi dengan membaca dan mencatat sejumlah literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau pada tempat lain pada sebuah daftar bahan pustaka.

##### **2. Penelitian lapangan.**

Dilihat dari cara mendapatkan informasi, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian untuk memperjelas kesesuaian antara konsep atau teori dengan praktek yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Validitas data dapat ditingkatkan kualitas dari pengambil datanya sendiri cukup valid. Untuk mempermudah dalam menganalisa data, maka pengumpulan data yang digunakan adalah:

---

<sup>2</sup>Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, (Cet, IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014), h. 128.

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung<sup>3</sup>.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.<sup>4</sup>

c. Dokumen

Dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.<sup>5</sup>

**E. Instrumen Penelitian**

Menurut Suharsimi Arikunto yang dikutip oleh Nurul Zuriah, instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi alat peneliti dalam mengumpulkan data. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul. Ungkapan “*Garbage tool garbage result*” merupakan hubungan antara instrumen dan data.<sup>6</sup> Oleh karena itu, instrumen harus relevan dengan masalah yang akan diteliti agar diperoleh data yang akurat.

Instrumen penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penelitian karena berfungsi sebagai alat atau sarana pengumpulan data.

---

<sup>3</sup>Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet, II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 220.

<sup>4</sup>Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, h. 130.

<sup>5</sup>Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 221.

<sup>6</sup>Nurul zuriah, *Metodologi penelitian social dan pendidikan*, (Cet II; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.168.

Dengan demikian, instrumen harus relevan dengan masalah dan aspek yang akan diteliti, agar supaya memperoleh data yang akurat

Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut<sup>7</sup>:

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku catatan berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
3. Tape Recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan dan pembicaraan dengan informan.
4. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

##### **1. Teknik Pengolahan**

Dalam penelitian teknik pengumpulan data merupakan hal yang utama karena untuk mendapatkan data yang akurat selain itu tanpa teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diharapkan. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

Data primer berarti data yang diperoleh melalui *field research* atau penelitian lapangan dengan cara-cara seperti *interview*. Pada penelitian ini penulis memperoleh sumber data dari beberapa responden dan informan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dan informan. Adapun responden dalam penelitian ini yakni masyarakat kecamatan Gantarang.

---

<sup>7</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet,16; Bandung: Alfabeta, 2013) h. 328.



Sedangkan data sekunder berarti data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku atau hasil munas tentang BP4. Bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan tersebut berasal dari hasil Munas BP4 yang diharapkan dapat memberikan petunjuk terhadap bahan kepustakaan yang mencakup buku-buku, tulisan yang termuat dalam jurnal ilmiah, yang membahas terkait BP4.

## 2. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dalam membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>8</sup>

Untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan deskriptif analisis yaitu peneliti mendeskripsikan dan memaparkan pola pikir induktif, yaitu mengemukakan data yang bersifat khusus. Kemudian dianalisa dengan paparan yang bersifat umum sesuai dengan analisis yuridis.

## G. Pengujian Keabsahan Data

### 1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan Pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *repport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi),

---

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 335.

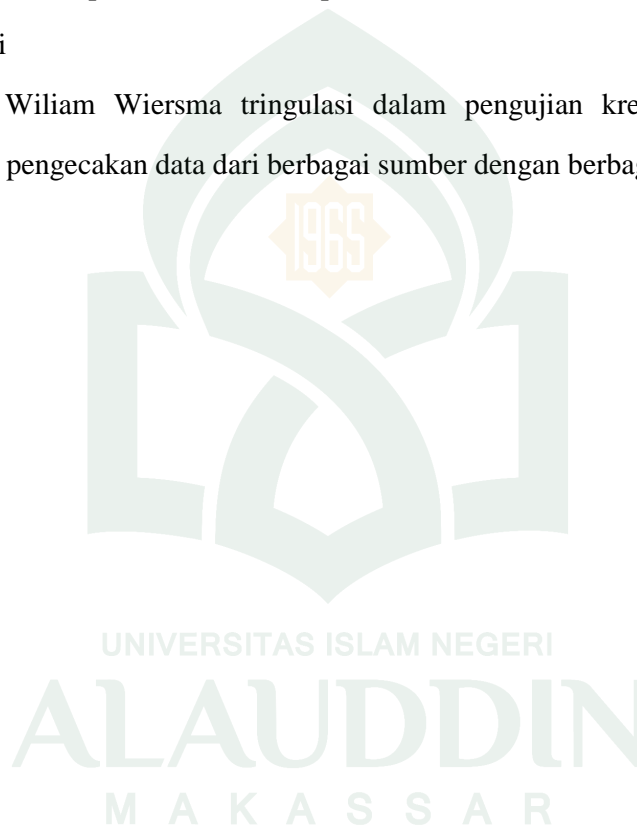
semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

## 2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan Ketekunan ini berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

## 3. Triangulasi

Menurut Wiliam Wiersma triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.<sup>9</sup>



---

<sup>9</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 369-372

## **BAB IV**

### **PERAN BP4 DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH DI KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Gantarang**

##### **1. Sejarah Kecamatan Gantarang**

Kecamatan Gantarang adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kecamatan Gantarang merupakan salah satu dari 10 Kecamatan yang berada di Kabupaten Bulukumba, awalnya Kecamatan Gantarang menyatu dengan Kecamatan Kindang dengan nama Kecamatan Gangking (Gantarang Kindang), tetapi dimekarkan menjadi dua Kecamatan.

Meskipun sudah dimekarkan, Kecamatan Gantarang tetap tercatat paling banyak penduduknya di antara 10 Kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Jumlah penduduknya pada tahun 2006 sebanyak 68.774 jiwa.

##### **2. Letak Geografis dan Demografis Kecamatan Gantarang**

###### **a. Letak Geografis**

Kecamatan Gantarang terletak dibagian barat kota Bulukumba yang berbatasan dengan<sup>1</sup> :

- Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Bantaeng
- Sebelah Timur berbatasan Kecamatan UjungBulu
- Sebelah Selatan berbatasan Laut Flores

---

<sup>1</sup>Muhammad Yahya, *Statistik Daerah Kecamatan Gantarang*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba.2016.

Letak astronomis kecamatan gantarang antara  $120^{\circ} 7' 30''$  lintang selatan dan  $5^{\circ} 32' 30''$  bujur timur dengan sebagian besar berada pada ketinggian 0-500 mdpl. Semua desa/kelurahan yang berada di kecamatan gantarang merupakan desa pesisir.

Luas wilayah kecamatan gantarang sekitar 173.510 km<sup>2</sup> atau sekitar 15.3 persen dari 10 kecamatan yang ada di bulukumba. Kecamatan Gantarang memiliki 3 Kelurahan dan 18 Desa antara lain :

Tabel I.

Data Banyaknya Rumah Tangga, Penduduk, Luas Desa dan Kepadatan  
Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba

No	Desa	RT	Penduduk	Luas Daerah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan (orang/km <sup>2</sup> )
1	MarioRennu	929	4494	11.79	381
2	Jalanjang	943	4975	11.46	434
3	Mattekko	948	3827	2.68	1428
4	Paenre Lompoe	1080	5229	5.15	1.015
5	Bialo	837	3015	6.40	471
6	Bonto Macinna	1235	4399	2.16	365
7	Bonto Masila	658	2900	7.74	375
8	Padang	916	3587	11.08	324
9	Barombong	539	1696	5.06	335
10	Bonto Sunggu	594	2419	5.30	456
11	Polewali	833	5157	7.10	725
12	Palambarae	850	3744	9.93	377
13	Bukit Tinggi	611	2580	5.03	513

14	Bontonyeleng	859	3121	11.00	284
15	Bukit Harapan	760	2786	11.33	246
16	Dampang	1075	4246	8.14	522
17	Bonto Raja	965	3771	12.29	307
18	Benteng Gattareng	752	3130	7.07	443
19	gattareng	972	4067	6.11	666
20	Benteng Malewang	648	2645	11.17	237
21	Taccorong	479	2270	5.57	411
Gantarang		17.483	74.061	173.51	427

Sumber : Badan Pusat Statistika kabupaten Bulukumba

Berdasarkan data yang dikemukakan Tabel 1 maka dapat di ketahui bahwa yang paling banyak penduduknya adalah desa Paenre Lompoe sebanyak 5229 jiwa. Dan yang paling sedikit penduduknya yaitu desa Barombong sebanyak 1696 jiwa.

#### b. Demografis Kecamatan Gantarang

Penduduk adalah semua yang bertempat tinggal pada suatu daerah, atau suatu wilayah tertentu, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat sendiri. Manusia mempunyai naluri untuk hidup dan senantiasa hidup bersama dengan sesamanya.

Manusia tanpa manusia lainnya pasti akan mati. Oleh karena itu, manusia dapat hidup sebagai masyarakat karena manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lainnya yang disebut makhluk sosial.

Kecamatan Gantarang merupakan salah satu kawasan yang berada dibagian Barat dari Kota Bulukumba terletak kurang lebih 20 km dari ibu kota Bulukumba.

Berdasarkan data dari Badan statistik daerah kabupaten bulukumba bahwa Setiap tahunnya penduduk Gantarang bertambah 1 % . jumlah penduduk laki-laki

sebanyak 35.423 jiwa dan perempuan sebanyak 38.638 jiwa dari totalnya 74.061 penduduk gantarang pada tahun 2005. Kecamatan Gantarang adalah yang terbesar jumlah penduduknya sekitar 10% dengan luas wilayah 12.62 km<sup>2</sup>.

Selama periode 2014-2015 laju pertumbuhan penduduk menjadi 0.99% atau sekitar 1% . sedangkan kepadatan penduduk 2005 setiap Km<sup>2</sup> dihuni sebanyak 586 jiwa. Selama tahun 2014-2015 adalah 91 dan 91.67 atau 92%.

Dari segi kepercayaan Penduduk Kecamatan Gantarang. Mayoritas masyarakatnya memeluk agama islam yaitu sekitar 74.000 jiwa yang berdomisili tetap, selebihnya itu non muslim. Dari data yang diperoleh bahwa non muslim yang berada di kecamatan gantarang sebanyak 61 jiwa yaitu terdiri dari 3 agama yaitu untuk agama Katolik sebanyak 10 jiwa, Kristen 39 jiwa, dan penganut Budha 9 jiwa. Meskipun penduduknya terdiri dari berbagai etnis dan budaya tetapi mereka hidup saling menghargai kepercayaan mereka. Sebagian besar penduduk Kecamatan Gantarang adalah Petani dan pedagang.

## **B. Struktur Organisasi BP4 Kecamatan Gantarang**

Organisasi BP4 disesuaikan dengan jenjang administrasi pemerintah mulai dari pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan. Organisasi ditingkat Provinsi sampai tingkat Desa/Kelurahan mempunyai bagian-bagian sebagai berikut.

1. Pendidikan keluarga sakinah dan pengembangan sumber daya manusia
2. Konsultasi hukum dan perkawinan
3. Kominikasi dengan informasi
4. Penelitian dan pengembangan
5. Penasehat perkawinan sakinah

6. Pembinaan keluarga sakinah
7. Upaya jaringan kerja
8. Bidang pemuda, remaja dan wanita

Mulai dari BP4 pusat sampai tingkat Desa/Kelurahan, dimasing-masing tingkatan memiliki petugas korps penasehatan perkawinan dan keluarga. Dimana anggota pengurus BP4 terdiri dari muslim dan muslimah dari instansi, LKM agama, lembaga dan organisasi profesi, tenaga ahli, pemuka agama dan tokoh masyarakat.

Adapun masa bakti pengurus disemua tingkat adalah 5 tahun, dan anggota pengurus lama dapat diangkat kembali.

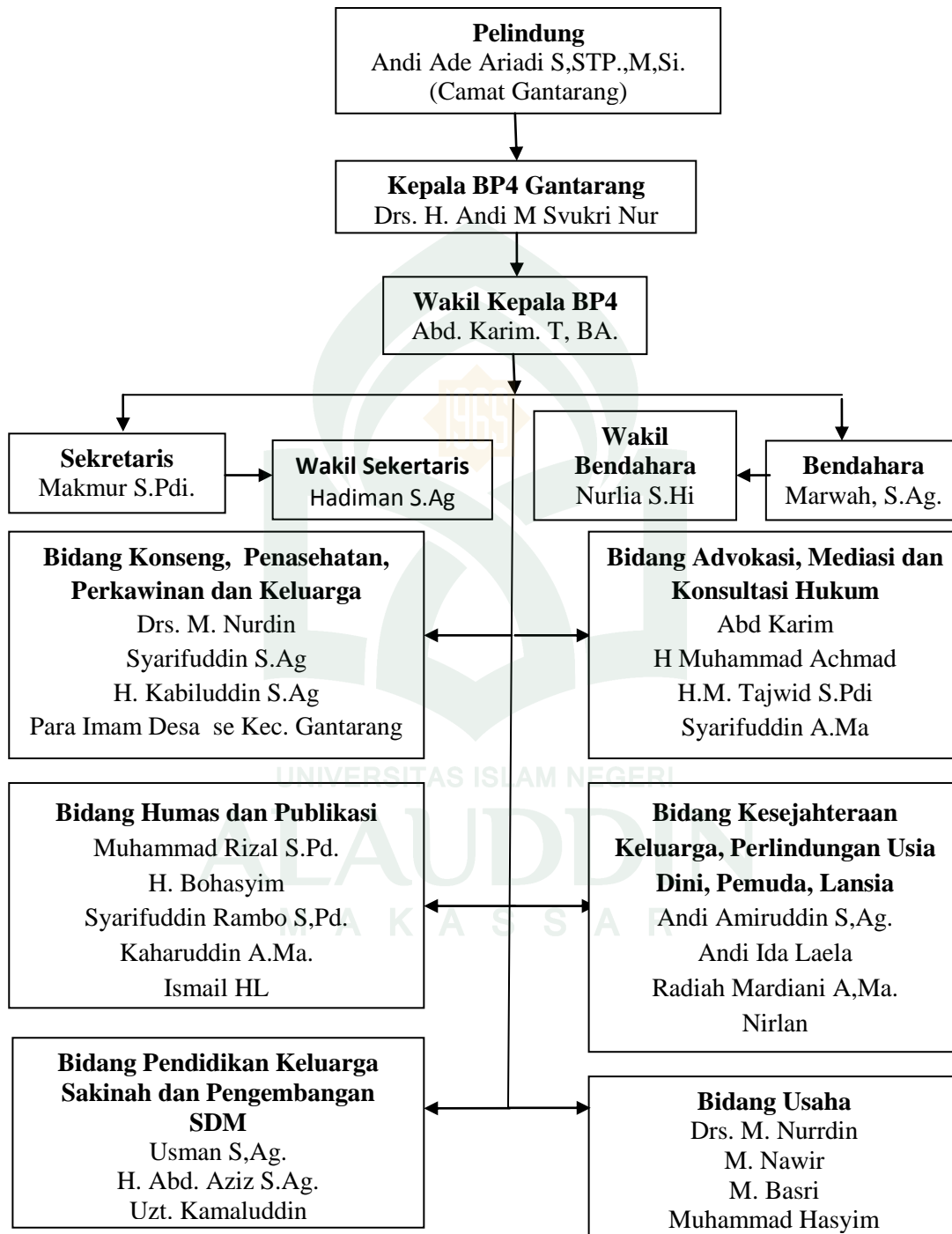
Pengurus BP4 pusat ditetapkan oleh Menteri Agama RI atas usul Musyawarah Nasional BP4, sedangkan pengurus ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Ketua BP4 yang setingkat lebih tinggi atas usul Musyawarah Daerah setempat.

BP4 Kecamatan Gantarang sendiri memiliki struktur organisasi, dengan tujuan pembagian tugas yang ada di BP4. Diharapkan dengan pembagian tugas ini kinerja BP4 Kecamatan Gantarang bisa lebih baik, karena masing-masing telah diberikan tugas dan masing-masing memiliki tanggung jawab atas tugas yang diberikan tersebut. Sehingga hasil yang selama ini diharapkan oleh BP4 Kecamatan Gantarang bisa tercapai dan bisa berefek positif terhadap masyarakat. Adapun struktur BP4 Kec. Gantarang sebagai berikut:<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Dokumen BP4 Kec.Gantarang

### Struktur Organisasi BP4 Kecamatan Gantarang Priode 2012-2016



Sumber: profil KUA Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba



Pada dasarnya BP4 tingkat Kecamatan sebagian besar pengurusnya dipegang oleh pengawai KUA Kecamatan ditambah oleh tokoh masyarakat dan unsur-unsur majelis taklim.

Kepengurusan/manajemen BP4 Kecamatan Gantarang mengikuti manajemen BP4 pusat dalam bidang pelaksanaan tugas penasehatan perkawinan dan kesejahteraan keluarga, hanya saja teknik dan pelaksanaan di lapangan yang berbeda, akan tetapi mempunyai tujuan yang sama atau searah yaitu mempertinggi mutu perkawinan dan mencegah terjadinya perceraian. Selain itu juga BP4 Kecamatan Gantarang membantu pelaksanaan tugas-tugas KUA Kecamatan Gantarang.

### **C. Kendala dan pendukung pelaksanaan Tugas-tugas BP4 di Kecamatan Gantarang**

Salah satu cita-cita perkawinan adalah membentuk keluarga bahagiah dan sejahtera tanpa adanya konflik didalamnya. Namun, untuk mencapai cita-cita tersebut tidak selalu berjalan lancar tetapi pasti ada saja kendala yang menghambat usaha seseorang dalam mencapai cita-cita tersebut.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Gantarang, yang pernah peneliti wawancarai hampir semuanya tidak mengetahui keberadaan BP4 dan apa itu BP4, menurut ibu Rukia yang menyatakan:

BP4 tidak pernah disosialisasikan, saya juga tidak mengetahui apa itu BP4? Yang saya tau jika ingin melangsungkan perceraian maka saya langsung ke Pengadilan Agama mengajukan gugatan.<sup>3</sup>

Sebagai sebuah instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dipastikan bahwa BP4 mempunyai kekurangan dan kelebihan. Demikian pula dengan BP4 yang ada di KUA Gantarang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pasti mempunyai kendala dan pendukung pelaksanaan tugas-tugasnya.

---

<sup>3</sup>Ibu Rukia, Wawancara, Bulukumba 25 september 2016.

Kendala atau penghambat pelaksanaan tugas-tugas BP4 tentu memberikan dampak terhadap keberhasilan atau upaya BP4, kendala yang sering muncul dipermukaan merupakan sarana untuk memahami dan menjelaskan apakah BP4 telah melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak.

Adapun Kendala-kendala BP4 yang terdapat dalam hasil Munas BP4 ke XIV tahun 2009 sebagai berikut:

1. Posisi/status BP4 terkait dengan bantuan APBN dan APBD belum jelas,
2. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 karena masih lemahnya SDM serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung,
3. Kemampuan manajerial pengurus BP4 yang belum memadai,
4. Sosialisasi terhadap keberadaan dan peran BP4 masih kurang, sehingga masyarakat belum mengenal dan tidak dapat memanfaatkan pelayanan konsultasi.

Sehingga dari hasil wawancara dengan bapak H. Andi Muhammad Syuti diketahui bahwa kendala pelaksanaan Tugas-tugas BP4 di Kecamatan Gantarang antara lain :<sup>4</sup>

1. Terbatasnya Fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan tugas penasehatan dan pembinaan keluarga.
2. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 karena masih lemahnya SDM
3. Sosialisasi terhadap keberadaan dan peran BP4 masih kurang, sehingga masyarakat banyak yang tidak tau BP4 dan mereka tidak memanfaatkan pelayanan konsultasi BP4

Keadaan ini terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan BP4 kepada masyarakat yang tidak cakap dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak banyak masyarakat yang memanfaatkannya. Hal ini banyak masyarakat yang lebih memilih Pengadilan ketimbang BP4.

---

<sup>4</sup>A. M. Syuti, Kepala BP4 Kec. Gantarang, Wawancara, Bulukumba 25 september 2016.

4. Makin meningkatnya keluarga bermasalah yang terjadi di Kabupaten Bulukumba
5. Masih lemahnya hubungan BP4 dengan Instansi pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Ada beberapa pendukung pelaksanaan tugas-tugas BP4 dalam membina keluarga sakinah antara lain :

1. Adanya dukungan dari para tokoh agama terhadap upaya penasihatn perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah.
2. Adanya kesedian masyarakat untuk meniru dan meladani sikap dan tingkah laku keluarga sakinah.
3. Besarnya harapan dan dukungan masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah
4. Besarnya dukungan moril instansi pemerintah, lembaga kemasyarakatan nasional, dukungan para pakar terdapat terhadap upaya penasihatn perkawinan dan pembinaan keluarga.

Kurangnya kerja sama BP4 dengan Pengadilan menjadi hambatan bagi BP4 dalam menjalankan tugas-tugasnya. Seharusnya Pengadilan Agama sebelum memeriksa kasus perceraian memerintahkan kepada pasangan yang hendak bercerai untuk melakukan mediasi di BP4, tetapi hal ini terbentur oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 yang memerintahkan hakim untuk menempuh jalur mediasi dahulu sebelum diajukan ke meja persidangan.

Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui KUA adalah tempat orang untuk menikah dan Pengadilan Agama tempat untuk bercerai.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas maka kiranya BP4 masih dapat dibutuhkan di masyarakat. Berbagai kendala BP4 perlu dicarikan solusi agar dapat mengoptimalkan tugas BP4 yang merupakan badan semi resmi. Sebagaimana dalam program kerja bidang advokasi dan mediasi yang tercantum dalam Munas BP4 ke XIV/2009 yang berlangsung di Jakarta 1-3 Juni 2009, disebutkan ada 3 program kerja yang dapat dilaksanakan antara lain :

1. Menyelenggarakan advokasi dan mediasi

2. Melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga.
3. Mengembangkan kerja sama fungsional dengan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Agama.

#### **D. Efektifitas BP4 sebagai Mediator dalam Membina Keluarga Sakinah**

Dengan banyaknya perkawinan yang terjadi tentu banyak pula kasus perceraian yang terjadi diakibatkan perselisihan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan semakin banyak keluarga, maka semakin banyak pula masalah-masalah yang ditimbulkan. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari banyaknya keluarga yang mengajukan perceraian baik dari pihak suami maupun isteri.

Dalam kehidupan rumah tangga pasti selalu ada konflik dan permasalahan yang terjadi, baik yang bersifat kekerasan ataupun tidak, dan ada yang bisa didamaikan dan adapula yang tidak bisa untuk didamakan diantara keduanya karena mempunyai prinsip-prinsip yang tidak bisa disatukan lagi. Dalam kaitan sebelum proses perceraian terjadi maka sangat diperlukan adanya sebuah mediator untuk memberikan nasehat atau pertimbangan kepada pasangan suami isteri agar dapat bersatu kembali sehingga disinilah peran BP4 diperlukan dalam menangani permasalahan tersebut.

BP4 merupakan pembantu dari Departemen Agama yang bertugas menciptakan keluarga sejahtera yang islami. Dimana BP4 yang berada ditingkat Kecamatan dirasa lebih dekat dengan masyarakat dan tentunya tahu situasi dalam masyarakat.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya BP4 ini mempunyai banyak macam tugas yang masuk kedalam program kerja mereka yaitu salah satunya memberikan kontribusi yang baik dimasyarakat guna tercapainya tujuan perkawinan.

Diantara program kerja BP4 adalah berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam memberikan penyuluhan dan diharapkan masyarakat mengetahui manfaat adanya Undang-Undang tersebut dan mau melaksanakannya dan mengupayakan agar tidak ada lagi ketidak pahaman masyarakat tentang Peraturan Perkawinan.

Dalam Keputusan Menteri Agama No. 30 tahun 1977 tentang penegasan, pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Kementrian Agama dalam bidang penesehatan, perkawinan dan perselisihan rumah tangga dan perceraian, maka kepanjangan BP4 diubah menjadi Badan Penasehatan perkawinan, perselisihan dan perceraian, bahwa tugas BP4 yaitu menciptakan dan menjaga keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Percerain terjadi karena salah satu dari mereka saling tidak cocok. Sehingga BP4 berharap agar pasangan suami isteri yang berselisih agar tidak berujung pada perceraian karena Tujuan dari BP4 yaitu mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran Agama Islam.

Efektifitas BP4 sebagai mediator belum cukup efektif karena antara lain:

1. kurangnya peran BP4 sehingga membuat masyarakat lebih memilih langsung mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dari pada melakukan konseling di BP4.

2. Tidak efektifnya BP4 disebabkan karena BP4 merupakan lembaga yang berdiri sendiri dan pada tahun 2009 telah lepas dari Kementrian Agama. BP4 sendiri merupakan lembaga yang berdiri tahun 1960 dan beradah dibawah Departemen Agama. Namun pada tahun 2009 sesuai hasil Munas ke 14 ditegaskan BP4 bukan lagi bagian dari Kementrian Agama dan tetap menjadi mitra Kementrian Agama. Dan
3. tidak adanya aturan atau Undang-undang yang secara resmi yang menyatakan bahwa BP4 adalah lembaga yang dapat memediasikan perceraian sebelum ke Pengadilan Agama, sehingga keluarga yang bermasalah langsung ke Pengadilan Agama.

Angka perceraian yang ada di Pengadilan Agama Bulukumba cukup besar di karena kan keinginan masyarakat untuk bercerai sudah sangat kuat sehingga sulit untuk didamaikan, tetapi BP4 sudah berupaya mencari jalan yang efektif dalam memberikan konsultasi. Dalam upaya mendamaikan keluarga yang bermasalah, Mediator BP4 mempunyai beberapa Strategi dalam memberikan konsultasi terhadap keluarga tersebut antara lain:<sup>5</sup>

1. Memahami terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami isteri tersebut
2. Memastikan apakah betul-betul ingin bercerai atau tidak
3. Memberikan senggang waktu kepada pasangan suami isteri untuk memikirkan kembali keinginannya untuk bercerai serta resiko yang akan ditanggung.
4. Memanggil para pihak (suami isteri)

---

<sup>5</sup>H. Andi M. Syukri Nur, Kepala BP4 Kecamatan Gantarang, Wawancara, Bulukumba, 20 September 2016.

Dalam menyelesaikan perselisihan keluarga, BP4 tidak bersifat aktif artinya BP4 tidak mencari-cari perkara perselisihan rumah tangga, akan tetapi para pihaklah yang mengadukan permasalahannya kepada BP4 untuk diselesaikan.

#### 5. Memberikan Nasehat Pada Pasangan Yang Bersengketa

Masyarakat zaman sekarang memerlukan adanya lembaga-lembaga atau orang yang dapat memberikan bantuan dalam mengatasi hubungan keluarga yang mengalami keretakan rumah tangga agar perkawinan mereka tidak bubar dan dapat melanjutkan hidup bersama secara harmonis. Bantuan yang dimaksud atas lazimnya dalam istilah sekarang dinamakan *Penesehatan* atau dalam bahasa inggrisnya disebut *Conseling, Consulting, Marriage Conseling* atau *Merriage Consulting* yang artinya Konsultasi Perkawinan.

Tujuan adanya konsultasi perkawinan yaitu untuk menghindarkan terjadinya perceraian. Tapi bukan hanya itu yang diusahakan juga sekedar mendirikan (damai dalam arti menyudahi perang) tetapi bagaimana dapat memuluhkan keserasian, keharmonisan, suasana saling memahami, harga-menghargai antara suami isteri yang bersengketa.

Adapun nasehat yang diberikan BP4 untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya sehingga diharapkan konflik yang terjadi pada pasangan suami isteri tidak semakin parah, sekaligus dapat menghindarkan dari terjadinya perceraian yang menyakitkan.

Adapun nasehat yang diberikannya BP4 dalam menangani keluarga bermasalah antara lain:<sup>6</sup>

##### a. Mengingat Memori Masa Lalu

---

<sup>6</sup>Wawancara Dengan Marwa Petugas KUA Gantarang pada tanggal 21 September 2016

Terkadang pasangan suami isteri yang sedang berselisih kerap kali melupakan memori indah ketika awal pernikahan mereka. Mereka cenderung mengikuti emosi dan ego masing-masing. Oleh karena itu, Mediator di BP4 dan Pengadilan Agama menasehati pasangan suami isteri yang sedang berselisih agar selalu mengingat-ingat memori indah ketika awal perkenalan sampai pernikahan mereka dan membuang segala rasa egois yang ada didalam diri mereka agar mau bersatu kembali.

b. Jangan sekali-kali meremehkan Pasangan

Dizaman modern sekarang ini banyak isteri-isteri tidak lagi mau menjadi penghuni sangkar (ibu rumah tangga), walau sangkar ini terbuat dari emas dan didalamnya tersedia segalanya. Mereka tidak mau dikurung, tetapi ingin lebih bebas dalam berfikir, berkeinginan, bercita-cita dalam mengembangkan kemampuan-kemampuannya.

Hal tersebut mempengaruhi terhadap keadaan dalam suatu rumah tangga khususnya dalam hal ekonomi. Walaupun suami adalah pemimpin keluarga, bukan berarti pendapatan keuangan suami itu harus lebih besar dari pada isterinya, tetapi pada zaman sekarang yidak sedikit pendapatan ekonomi isteri lebih besar dari pada suaminya, hal ini terkadang para suami merasa terkucilkan oleh isteri sehingga dapat memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya.

c. Sikap Lapang Dada Suami Isteri

Seorang isteri kerap kali tidak dapat memahami latar belakang masalah yang sedang dihadapi suaminya. Hal ini kadang sangat memperparah masalah karena seorang isteri akan selalu menuntut, disebabkan oleh kodrat wanita yang semacam



ini, segoyahnya seorang suami pasti memiliki sifat lapang dada, dan tidak tergesa-gesa menghitung kesalahan-kesalahan yang dilakukan isterinya.

d. Kemaslahatan Yang harus Dijaga

Sudah sangat jelas dan nyata bahwa untuk mewujudkan sebuah kehidupan dan kebahagiaan, islam menuntut beberapa kewajiban dari umatnya. Antara lain, islam memberikan tanggungjawab kepada manusia untuk memenuhi segala kebutuhan sebagai sarana tegaknya hukum-hukum kemanusiaan.

Tidak asing lagi bagi masyarakat kita yang tengah dilanda masalah harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk memperbaikinya agar dapat terhindar dari perpecahan. Maka BP4 dan Pengadilan Agama menyarankan setiap pasangan suami isteri yang mempunyai masalah agar menjahui sikap yang justru dapat memperparah situasi. Ciptakanlah ketenangan, hindarilah perpecahan dan gejolak supaya tidak terbuang-buang waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurus hal-hal yang lebih penting. Kobarkanlah semangat rindu, hapuskanlah trauma-trauma masa lalu yang menyakitkan, bukalah lembaran baru, dan torehkanlah sejarah baru yang cemerlang.<sup>7</sup>

e. Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban

Hak adalah suatu yang harus diterima sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik. Begitulah kehidupan antara suami isteri dalam setiap rumah tangga, apabila hal tersebut tidak seimbang niscaya akan timbul perpecahan dan perselisihan dalam rumah tangga.

---

<sup>7</sup>Ali Husain Muhammad Makki, *Perceraian Salah Siapa :Bimbingan Islam Dalam Mengetahui Problematika Rumah Tangga*, Jakarta, Lentera, 2001,h.123.

Sebaliknya jika antara hak dan kewajiban itu sejalan, maka terwujudlah keserasiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, rasa kebahagiaan semakin terasa dan kasih sayang akan terjalin dengan baik. Sang anak menghormati orang tuanya, orang tua sayang kepada anaknya, suami menghargai isterinya dan isteripun menghargai menghargai suaminya dan seterusnya. Maka inilah yang dimaksud oleh Rasulullah saw dengan sabdanya yang artinya yaitu *“Rumah Tanggaku Laksana Surga Bagiku”*. Oleh karena itu antara suami dan isteri harus tahu dan melaksanakan hak serta kewajibannya masing-masing, demikian juga anak harus tahu diri dan menghormati orang tuanya.

Pada umunya yang menimbulkan perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga yaitu karena salah satu pihaknya tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, mereka tidak saling menghargai, tidak saling menghormati, tidak saling pengertian antara sesama mereka dalam rumah tangganya.

f. Pengalaman ajaran Agama Dalam Rumah Tangga

Dalam setiap rumah tangga sangat penting memiliki pengalaman agama, karena ajaran agama islam adalah salah satu-satunya pegangan hidup manusia yang mengatur sikap dan tingkah laku agar sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Mendidik dan mengajar anak-anak atau keluarga adalah suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar oleh pasangan suami isteri, sesuai sabda Rasulullah SAW yang artinya: “Tiap-tiap kamu menjadi pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, raja adalah pemimpin, tiap laki-laki menjadi pemimpin terhadap penghuni rumah tangganya (keluarganya). Dan perempuan-perempuan menjadi pemimpin (pengasuh) dari rumah tangga suami dan anak-

anaknya. Tiap-tiap kamu menjadi pemimpin, dan tiap pemimpin akan ditanya kelak (bertanggung Jawab) terhadap orang-orang dipimpinnya”. (H.R Bukharii)

Berdasarkan hadist Rasulullah SAW diatas, dapat disimpulkan bahwa suami istri wajib mengajar atau menuntun anak-anak dan keluarganya dengan ilmu pengetahuan agama, sehingga mereka mengerti dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dari nasehat yang diberikan BP4 kepada pasangan suami isteri yang mempunyai permasalahan rumah tangga maka agar kiranya mau melaksanakan nasehat tersebut dengan baik, jika pasangan suami isteri melaksanakan dengan betul maka apapun permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dapat diselesaikannya dengan sendiri.

Dalam menangani pasangan suami isteri yang ingin bercerai maka BP4 memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan rumah tangga yaitu :

1. Komunikasih yang baik antara suami isteri.
2. Kejujuran

Kejujuran dalam rumah tangga sangat penting karena dengan sifat kejujuran yang dibina dalam rumah tangga dapat menghilangkan sifat saling curiga antara suami dan isteri sehingga kepercayaan dapat terjalin dengan baik.

3. Saling Pengertian antara satu sama lain.
4. Keterbukaan satu sama lain

Perlu saling keterbukaan antara suami dan isteri dalam kehidupan keluarganya dan tidak perlu ditutupi satu sama lain baik permasalahan ekonomi maupun pekerjaan

5. Menjaga amanah dan rahasia masing-masing

Suami dan isteri harus pandai menjaga aib keluarga, keburukan dan kekurangan suami maupun isteri tidak boleh disebar kepada tetangga atau yang lain karena bisa memicu pertengkaran satu sama lain nanti.

#### 6. Iman dan taqwa

Iman dan taqwa merupakan pondasi dasar dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Insya Allah ketika pasangan suami isteri taat kepada aturan Allah swt maka semua persoalan yang dihadapi akan dapat diselesaikan dengan baik.

#### 7. Saling bertanggung jawab

Meskipun demikian, keberadaan BP4 masih kurang diketahui oleh masyarakat karena sosialisasi yang masih kurang serta pemahaman masyarakat terhadap hukum yang minim. Di samping itu, pelaksanaan BP4 tidak sesuai dengan konsep yang ada. Misalnya saja, perkara yang masuk di BP4 tidak tercatat atau tidak diarsipkan sehingga tidak diketahui jumlah perkara yang berhasil dan tidak berhasil didamaikan.

Kemudian dalam manajemen finansialnya, BP4 masih dirasa sangat kurang karena belum ada anggaran tetap untuk BP4 dari APBN, sehingga ini menjadi kendala bagi BP4 untuk memberdayakan para mediator juga lembaganya sehingga dalam mengsosialisasikan keberdaannya dan perannya sering terbentur dengan masalah finansial.

Adapun menurut penulis, BP4 dapat berjalan dengan efektif apabila dilakukan sosialisasi dengan maksimal, mendata jumlah keluarga sakinah dalam setiap kecamatan, memberikan nasehat/konsultasi secara teratur di mesjid-mesjid serta membangun kerja sama dengan Pengadilan Agama Bulukumba agar keluarga

yang bermasalah terlebih dahulu berkonsultasi di BP4 sebelum mengajukan permohonan/gugatan di Pengadilan Agama.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang peran BP4 sebagai Mediator dalam Membina Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kendala Pelaksanaan Tugas-tugas BP4 Kecamatan Gantarang, antara lain:
  - a. Terbatasnya fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan tugas penasihatan dan pembinaan keluarga.
  - b. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 karena masih lemahnya SDM
  - c. Sosialisasi terhadap keberadaan dan peran BP4 masih kurang, sehingga masyarakat banyak yang tidak tau BP4 dan mereka tidak memanfaatkan pelayanan konsultasi BP4
  - d. Makin meningkatnya keluarga bermasalah yang terjadi di Kabupaten Bulukumba
  - e. Masih lemahnya hubungan instansi pemerintah dan lembaga kemasyarakatanSedangkan pendukung Pelaksanaan Tugas BP4 antara lain,
  - a. adanya kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan,
  - b. Adanya kesedian masyarakat untuk meniru dan meladani sikap dan tingkah laku keluarga sakinah.
  - c. Besarnya harapan dan dukungan masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah

- d. adanya dukungan para pakar terhadap upaya penasihatn perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah.

## 2. Efektifitas BP4 belum cukup efektif karena kurangnya

- a. peran BP4 sehingga membuat masyarakat lebih memilih langsung mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dari pada melakukan konseling di BP4.
- b. Tidak efektifnya BP4 disebabkan karena BP4 merupakan lembaga yang berdiri sendiri dan pada tahun 2009 telah lepas dari Kementrian Agama. BP4 sendiri merupakan lembaga yang berdiri tahun 1960 dan beradah dibawah Departemen Agama. Namun pada tahun 2009 sesuai hasil Munas ke 14 ditegaskan BP4 bukan lagi bagian dari Kementrian Agama dan tetap menjadi mitra Kementrian Agama. Dan
- c. juga tidak adanya aturan atau Undang-undang yang secara resmi yang menyatakan bahwa BP4 adalah lembaga yang dapat memediasikan perceraian sebelum ke Pengadilan Agama.

## **B. Implikasi Penelitian**

1. Bagi BP4 supaya lebih mengsosialisasikan BP4 kepada masyarakat, supaya masyarakat dapat mengetahui fungsi dan keberadaan BP4 sebagai badan penasehatan perkawinan sehingga masyarakat tidak canggung mendatangi BP4 untuk menyampaikan atau mencurahkan permasalahan keluarga yang dihadapi.
2. Bagi Masyarakat hendaknya mempertimbangkan dan berfikir secara matang sebelum mengambil keputusan untuk bercerai dan memanfaatkan lembaga BP4 sebaik-baiknya sebelum ke Pengadilan Agama karena lembaga BP4 memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran agama islam.

3. Masyarakat juga perlu meningkatkan pemahaman pentingnya mempertahankan keutuhan keluarga. Dengan demikian mereka kan merasa perlu memiliki pengetahuan dan mau belajar untuk mencapai keluarga yang sakinah



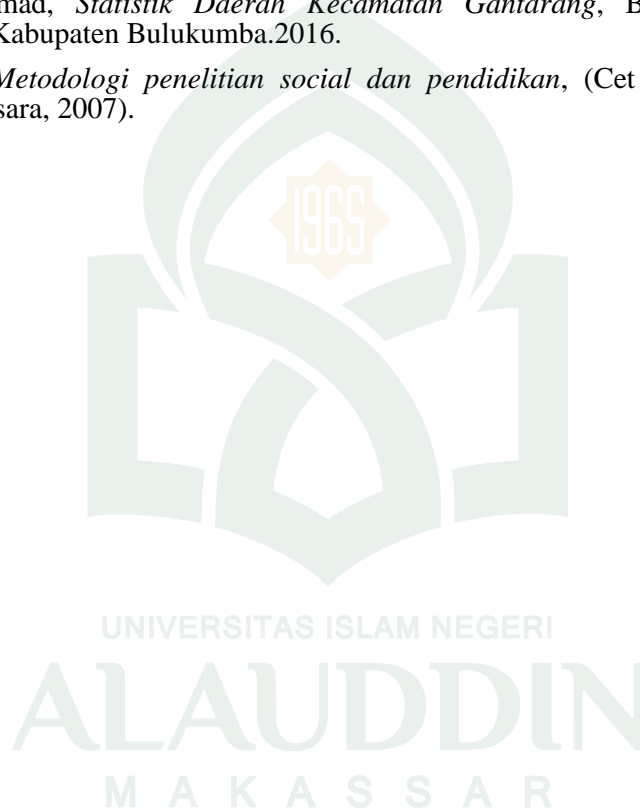


## DAFTAR PUSTAKA

- Abiummi “*Meraih Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah*”, Blog Abiummi, <https://abiummi.com/meraih-keluarga-sakinah-mawaddah-warahmah/> 15 September 2016.
- Al-Abdillah, Abdul Aziz bin Nashir Su’ud, *Kado Terindah Sang Pengantin*, Pustaka Hikmah, Jakarta, 2008.
- Ali Husain, Muhammad Makki, *Perceraian Salah Siapa :Bimbingan Islam Dalam Mengetahui Problematika Rumah Tangga*, Jakarta, Lentera, 2001
- Andi Syahrani. *Bimbingan Keluarga Sakinah*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Arif Harsanto, Mayzan. “*Peran Penasehatan BP4 Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (studi kasus di kelurahan purbayan kotagede Yogyakarta tahun 2007-2009)*”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009).
- Asfahany, Raghieb. *Musfradat Alfadh al-Qur’an* (Damasyiq: Darussalam, t.th) Juz 2.
- Az-za’Balawi ,M. Sayyid Muhammad, *Pendidikan Remaja Antara Islam dan Ilmu Jiwa*, Depok; Gema Insani, 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- BP4 Pusat. “Sejarah BP4”. *Situs Resmi BP4 Pusat*. <http://www.bp4pusat.or.id> (21 April 2016).
- Dalam [islam.com/hukum-islam/pernikahan/konflik-dalam-keluarga](http://islam.com/hukum-islam/pernikahan/konflik-dalam-keluarga). 20 Februari 2017
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Indah Press, 1995.
- Departemen Agama R.I. Direktorat Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta: 2001.
- Dokumen KUA Kec. Gantarang.
- Dokumen BP4 Kec. Gantarang
- Dwiki. “*Konsep Keluarga sakinah menurut islam dan pembahasan lengkap*”, Blog DwikiBanjarwangi.com/blog/2015/08/25/konsep-keluarga-sakinah-menurut-islam-dan-pembahasan-lengkap (23 April 2016).
- Fimadani, “*Bagaimana Membangun Keluarga Sakinah?*”, Blog Fimadani. [www.fimadani.com/bagaimana-membangun-keluarga-sakinah/](http://www.fimadani.com/bagaimana-membangun-keluarga-sakinah/). Diakses pada 20 Mei 2016.
- Hasil Munas, BP4 XV, *Anggaran Dasar dan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: BP4 DIY, 2014).
- \_\_\_\_\_, BP4 XIV, *Anggaran Dasar dan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: BP4 DIY, 2009). 1-3 Juni.
- \_\_\_\_\_, BP4 XIII/2004, *Badan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga, dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Nasional*, Jakarta, 14-17 Agustus.
- Hamid Kisyik, Abdul, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2005.

- H. Andi M. Syukri Nur, Kepala BP4 Kecamatan Gantarang, Wawancara, Bulukumba, 15 Maret 2017
- Ichsan, Muhammad. *Jangan Perna Bercerai*, (Yogyakarta: Ichsan Media, 2009).
- Kadir, Ahmad. *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat* (Cet.I; Makassar: Indobis, 2006).
- KUA Gantarang. "Profil KUA Gantarang". Situs Resmi KUA Gantarang. <http://kuagantarang.blogspot.co.id/2014/II/profil-kua-gantarang.html> (05 April 2016).
- Marwa, Petugas BP4 KUA Gantarang, Wawancara, Bulukumba, 23 Mei 2016.
- Marhama, Siti. "*Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Terjadinya perceraian di Kabupaten Wonosobo*" Skripsi, (Semarang: Fak. Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2011).
- M. Hasral. Kepala KUA Gantarang, Wawancara, Bulukumba, 29 Juli 2016.
- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet ke-4; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004).
- Portal Layanan Informasi Perkara Peradilan Agama, Situs Resmi Peradilan Agama Se Indonesia. <http://infoperkara.bidilag.net> (06 April 2016).
- Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/542/tahun 2013 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. KUA Kec. Gantarang
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
\_\_\_\_\_, *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*  
No : DJ.II/542 Tahun 2013.
- Riadi, Muchlisin. "Defenisi, Fungsi dan Bentuk Keluarga". Blog Muchlisin Riadi. <http://www.kajianpustaka.com/2012/11/defenisi-fungsi-dan-bentuk-keluarga.html>. (02 April 2016).
- Saleh Ridwan, Muhammad, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Alauddin University Press, Makassar, 2013
- Setiawan, Ebita. "KBBI Online", Blog Ebita Setiawan. <http://kbbi.web.id/bina>. (20 April 2016).
- Siregar, Syofian. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, (Cet.IV; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014).
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet.II; Bandung: Rosda, 2006).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet, 16; Bandung: Alfabeta, 2013).
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian*, (Cet.IV; Yogyakarta: Rineka Cipta, 1999).
- Summa, Amin Muhammad. *Hukum Keluarga Di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004).
- Subhan, Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta; Pustaka Pesantren, 2004.

- Syudud , A. Fatih, *Keluarga Sakinah, Cara Membina Rumah Tangga harmonis, Bahagia dan Berkualitas*, Malang; Pustaka Al-Khoirot, 2013.
- Talamasyah, Rahmat. “Profil Kabupaten Bulukumba”, Blog Rahmat Talamasyah. [www.rachmatalamasyah.com/2012/06/profil-kabupaten-bulukumba.html](http://www.rachmatalamasyah.com/2012/06/profil-kabupaten-bulukumba.html) (10 Mei 2016).
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (studi Terhadap pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*. (Cet. I; Jakarta: Kementrian Agama RI. 2011).
- Usman, Husaini. dan Akbar, Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Yahya, Muhammad, *Statistik Daerah Kecamatan Gantarang*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba. 2016.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi penelitian social dan pendidikan*, (Cet II; Jakarta: Bumi Aksara, 2007).



## PEDOMAN WAWANCARA

diajukan kepada BP4 Kec. Gantarang

---

1. Bagaimana sistem pembinaan dan penasehatan yang dilakukan oleh BP4 di Kecamatan Gantarang?
2. Apakah masyarakat tau tentang BP4 yang ada di KUA?
3. Apakah pelaksanaan fungsi kepanasehatan di BP4 ini telah berjalan dengan seharusnya atau belum?
4. Apakah ada perbedaan tugas antara BP4 di Kabupaten dan di Kecamatan?
5. Apa saja tugas BP4 kecamatan Gantarang?
6. Apakah ada perbedaan tugas antara BP4 di Kabupaten dengan BP4 yang ada di Kecamatan?
7. Seperti apa konsep mediasi yang dilakukan di BP4?
8. Apasaja isi nasehat yang di berikan BP4 kepada keluarga yang berselisih?
9. Apakah BP4 menjalin kinerja dengan Pengadilan Agama dalam proses mediasi ?
10. Bagaimana Peran BP4 dalam mencegah Perceraian yang ada di Kecamatan gantarang ?
11. Apakah BP4 pernah disosialisasikan ke masyarakat?
12. Faktor apa saja yang menghambat dan mendorong keberhasilan BP4 dalam melaksanakan Tugas-tugasnya ?
13. Bagaimana efektifitas BP4 dalam membina keluarga Sakinah yang ada di kecamatan Gantarang?
14. Apasaja Upaya BP4 dalam menangulangi terjadinya perselisihan rumah tangga.

## PEDOMAN WAWANCARA

Diajukan kepada masyarakat di kecamatan Gantarang

---

1. Apakah bapak/ibu mengenal keberadaan BP4 di KUA? sejauh mana pengetahuan bapak/ibu tentang BP4?
2. Apakah bapak/ibu mempunyai masalah rumah tangga dan pernahkan bapak/ibu mengadukannya ke BP4?
3. Apakah BP4 memberikan bimbingan dan arahan untuk mewujudkan sebuah keluarga bahagia? Apa saja bimbingan tersebut?
4. Apa isi nasehat yang pernah bapak/ibu terima dari penasehatan BP4?
5. Apakah dengan adanya BP4 membawa dampak bagi kelangsungan hidup rumah tangga bapak/ibu?
6. Apa saja dampak dari penasehatan BP4 tersebut?
7. Adakah perubahan yang terjadi di dalam keluarga bapak/ibu setelah mendapatkan penasehatan dari BP4, kalau ada Dalam hal apa saja perubahan tersebut?
8. Setelah mendapat penasehatan BP4, apakah bapak/ibu melaksanakan isi nasehat itu?
9. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang peran BP4 dalam menangani keluarga yang bermasalah?
10. Apakah adanya BP4 membantu bapak/ibu dalam menangani perselisihan rumah tangga?
11. Apakah peran penasehatan yang diberikan BP4 sangat bermanfaat bagi pembentukan keluarga yang harmonis?
12. Apakah dalam keluarga bapak/ibu sering terjadi cekcok atau kekerasan dalam rumah tangga? Bagaimana cara mengatasinya?

13. Apakah bapak/ibu menanamkan pendidikan keagamaan dalam keluarga? contohnya?
14. Apa saja upaya yang dilakukan bapak/ibu dalam menjaga keharmonisan keluarga?
15. Pernahkah bimbingan yang diajarkan oleh BP4 ada yang berguna dan diperaktekkan dalam kehidupan bapak/ibu ! berikan contohnya dalam hal apa saja?



L

A

M

P

I



A

N









Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gantarang



Wawancara dengan Ketua BP4 Kecamatan Gantarang



## PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Kartini Rustan, NIM: 10100113123, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul "Peran BP4 sebagai Mediator dalam Membina Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk digunakan lebih lanjut.

Makassar, 25 Maret 2017

26 Jumaidil Akhir 1438 H

Munaqisy I : Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.Ag.

Munaqisy II : Drs. H. M. Jamal Jamil, M.Ag.

Pembimbing I : Dr. H. Supardin, M.H.I.

Pembimbing II : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
NIP. 196210161990031003

Diketahui oleh:  
Ketua Jurusan Peradilan

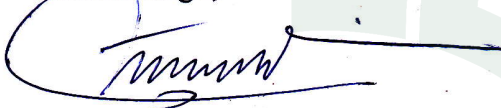
Dr. H. Supardin, M.H.I.  
NIP. 196503021994031003

## PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Draft skripsi yang berjudul, "Peran BP4 sebagai Mediator dalam Membina Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba", yang disusun oleh: Kartini Rustan, NIM: 10100113123, Mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diseminarkan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2016 M bertepatan pada tanggal 24 Rajab 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian.

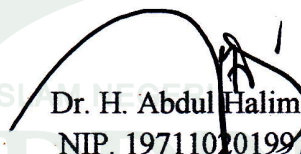
Makassar, 18 Mei 2016  
24 Rajab 1437 H

Pembimbing I,



Dr. H. Supardin, M.Hi.  
NIP. 19650302 199403 1 003

Pembimbing II,



Dr. H. Abdul Halim Talli, M.Ag.  
NIP. 19711010199703 1 002

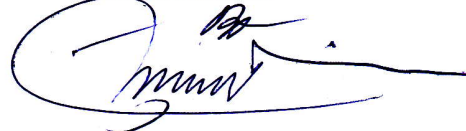
Disahkan oleh:



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
NIP. 19621016199031003

Mengetahui:

Ketua Jurusan



Dr. H. Supardin, M.Hi.  
NIP. 1960302 199403 1 003





**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**KECAMATAN GANTARANG**  
**Jl. H. A. Sulthan Dg Raja Ponre Kode Pos 92561**

**REKOMENDASI IZIN**  
Nomor : 07 /GT - VI /2016

Berdasarkan Surat dari Badan Penelitian, Pengembangan, Perpustakaan dan Kearsipan Nomor : 564/BP3K/LB/VI/2016, Tanggal 27 Juni 2016 Perihal *Izin Penelitian*, maka dengan kami memberikan Rekomendasi Kepada:

Nama : KARTINI RUSTAN  
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba, 10 November 1995  
Nomor Pokok : 10100113123  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Program Studi : Peradilan  
Alamat : Jl.H.M. Yasin Limpo No. 36, Gowa  
Lamanya Penelitian : Tanggal 27 Juni s/d 4 Agustus 2016

Bermaksud melakukan penelitian/pengambilan data di Kecamatan gantarang kabupaten bulukumba dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul "PERANAN BP4 SEBAGAI MEDIATOR DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH MAWADDAH DAN RAHMAH DI KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA"

Demikian rekomendasi ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponre, 28 Juni 2016



KECAMATAN GANTARANG  
KECAMATAN GANTARANG

ASRI, S.Sos  
NIP. 19620620 198903 1 007





1 2 0 1 6 1 9 1 4 2 8 8 3 7

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
( UPT - P2T )

Nomor : 8593/S.01.P/P2T/06/2016

Lampiran :

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bupati Bulukumba

di-

Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : SI.1/PP.00.9/1628/2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **KARTINI RUSTAN**  
Nomor Pokok : 10100113123  
Program Studi : Peradilan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PERAN BP4 SEBAGAI MEDIATOR DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH MAWADDAH DAN RAHMAH DI KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 Juni s/d 04 Agustus 2016**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal : 22 Juni 2016

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



**A. M. YAMIN, SE., MS.**

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip. 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
2. Pertinggal



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
*Alamat : Jl. Durian No. 2 Telp. (0413) dan 81102 Bulukumba 92511*

Bulukumba, 27 Juni 2016

Nomor : 564/BP3K/LB/VI/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. 1. Kepala Pengadilan Agama  
2. Camat Gantarang  
3. Kepala KUA Kec. Gantarang  
Masing-Masing di-  
Bulukumba

Berdasarkan Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (UPT-P2T) Provinsi Sulawesi Selatan Makassar Nomor : 8593/S.01.P/P2T/06/2016 tertanggal 22 Juni 2016 Perihal Izin Penelitian, maka yang tersebut dibawah ini :

Nama : **KARTINI RUSTAN**  
No. Pokok : 10100113123  
Prog. Studi : Peradilan  
Alamat : Jl. H.M.Yasin Limpo No. 36, Gowa

Bermaksud melakukan penelitian/pengambilan data di Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) dengan judul "**PERAN BP4 SEBAGAI MEDIATOR DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH MAWADDAH DAN RAHMAH DI KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA**" akan berlangsung pada tanggal 27 Juni s/d 4 Agustus 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami **mengizinkan** yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian/pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq.Kepala Badan Penelitian Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan Kab Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Badan



**TAURIK, S.H., M.H.**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19631231 199203 1 102

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);

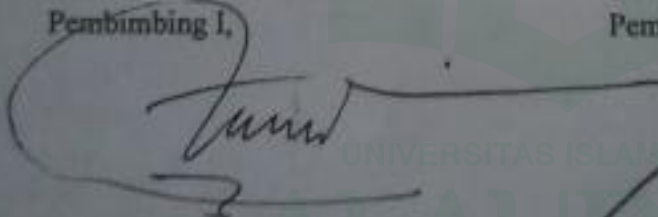


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal skripsi saudara Kartini Rustan, NIM : 10100113123. Mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama proposal skripsi yang berjudul, "Peran BP4 sebagai Mediator dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahma di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba", memandang bahwa proposal skripsi ini tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan (seminar proposal).

Makassar, 13 Mei 2016

Pembimbing I,



Dr. H. Supardin, M.Hl.  
NIP. 19650302 199403 1 003

Pembimbing II,



Dr. H. Abdul Halim Yalli, M.Ag.  
NIP. 19711020 199703 1 002



Disetujui:  
Ketua Jurusan Peradilan,

Dr. H. Supardin, M.Hl.  
NIP. 19650302 199403 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
KECAMATAN GANTARANG  
DESA PALAMBARAE**

Nomor : 12 / PLB/ VI /2017  
Lampiran : -  
Perihal : Telah Melaksanakan Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Palambarae Kecamatan Gantarang menerangkan bahwa:

Nama : Kartini Rustan  
Nim : 10100113123  
Prodi : Peradilan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Bacari

Yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian di Desa Palambarae Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba, dari tanggal 23 Juni s/d 04 Agustus 2016 menyusun dengan judul penelitian **Peran BP4 Sebagai Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah Di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palambarae, 25 Juli 2016



Tembusan:

1. Camat Gantarang
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Kampus 1: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 86428-864931 Fax: 864828  
 Kampus 2: Jl. H. M. Tazul Karim No. 36 Sempu/Sungguminara - Gowa Telp: 841870 Fax: 8221408*

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
 Nomor 343 Tahun 2017  
**TENTANG**  
**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI**  
**TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

**Membaca**

Surat Permohonan

Nama

Kartini Rostam

N I M

10100113123

Jurusan

Peradilan Agama

Hari/Tanggal

Selasa, 4 April 2017

Prehal

Ujian Munaqasyah/Skripsi

Judul

"Peran BP4 sebagai Mediator dalam Membina Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah di Kec. Cantatang Kab. Bulukumba"

**Menimbang**

- a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi,
- b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji,
- c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 dan Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Mandat kepada Surat Keputusan,
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar,
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**Pertama**

Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut

Ketua

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

Sekretaris

Dr. Hamsir, M.Hum

Penguji I

Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A

Penguji II

Dr. H. M. Jamal Jamil, M.Ag

1. Mujahidah, SE

2. Nurhayati Wahid

**Ujian Munaqasyah/Skripsi**

**Ketiga**

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;

**Keempat**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Samata

31 Maret 2017

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan

Yb. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata - Gowa.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864931  
 Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 20 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax. 8221000*

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
 Nomor 24 Tahun 2017  
**TENTANG**  
**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI**  
**TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :  
 Nama : Kartini Rustam  
 N I M : 10100113123  
 Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan  
 Hari/Tanggal : Senin, 27 Maret 2017  
 Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
 Judul : "Peran BP4 Sebagai Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah di Kabupaten Bulukumba"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;  
 b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
 c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;  
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 65 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
 6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
 Sekretaris : Dr. Hj. Patimah, M.Ag  
 Penguji I : Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A.  
 Penguji II : Drs. H. M. Jamal Jamil, M.Ag  
 Pelaksana : 1. Mujahidah, SE  
 2. Nurhayati Wahid
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017.  
**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
 NIP. 19621016 199003 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT GANTARANG NOMOR: 04/IGT-IV/2012  
TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS BADAN PENASEHATAN, PEMBINAAN DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) TINGKAT KECAMATAN GANTARANG PERIODE 2012-2016

- Pembina**
1. ANDI ADE ARIADI S, STP ✓
  2. H. ANDI ABD MUIN ABTY
  3. A. M. HARSAL S, AG ✓
  - ✓ 4. H. A. M. SYUAIB S, Pd
  5. Para Kep Desa/Lurah se- Kec. Gantarang
- Pengarah**
1. HJ. HAWATIA SE
  - ✓ 2. SAKRAMAWATI S, Ag
  - ✓ 3. JUMRIATI A, Ma
  - ✓ 4. ISHAK A, Ma
- Dewan Pertimbangan**
- ✓ 1. Ketua MUI Kec. Gantarang ✓
  2. Ketua Pengurus N.U Kec. Gantarang
  3. Ketua Pengurus Muhammadiyah Kec. Gantarang
  4. Ketua Penatuan Wanita Dep Agama Kec. Gantarang
  5. Tokoh Agama/Masyarakat se-Kec. Gantarang

**Ketua** : **Drs. H. ANDI M. SYUKRI NUR**

**Wakil Ketua** : ABD KARIM T, BA ✓

**Sekertaris** : MAKMUR S, Pd ✓

**Wakil Sekertaris** : HADIMAN S, Ag ✓

**Bendahara** : ✓ MARWAH S, Ag ✓

**Wakil Bendahara** : ✓ NURLIA S, H

**Bidang-Bidang:**

1. Bidang Konseling, Penasehatan Perkawinan dan Keluarga

**Ketua** : Drs. M. NURDIN ✓

**Anggota** : ✓ SYARIFUDDIN S, Ag

✓ H. KABILUDDIN S, Ag ✓  
PARA IMAM DESA SE-KEC GANTARANG ✓

2. Bidang advokasi, Mediasi dan Konsultasi Hukum

**Ketua** : ABD KARIM ✓

**Anggota** : H. MUHAMMAD ACHMAD ✓

H. M. TAJWID S, Pd ✓

✓ SYARIFUDDIN A, Ma ✓

3. Bidang Humas, Publikasi

**Ketua** : ✓ MUHAMMAD RIZAL S, Pd

**Anggota** : H. BOHASYIM ✓

✓ SYAHRUDDIN RAMBO S, Pd

✓ KAHARUDDIN A, Ma

✓ ISMAIL HL ✓

4. Bidang Kesejahteraan Keluarga, Perlindungan Usia Dini, Pemuda dan Lansia

**Ketua** : ANDI AMERUDDIN S, Ag ✓

**Anggota** : ✓ ANDI IDA LAELA

✓ RADIAH MARDIANI A, Ma

✓ NURLAN ✓

5. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM

**Ketua** : USMAN S, Ag ✓

**Anggota** : H. ABD AZIZ S, Ag ✓

✓ UZT. KAMALUDDIN ✓

✓ SAPIAH A, Ma

6. Bidang Usaha

**Ketua** : Drs. M. NURDIN ✓

**Anggota** : M. NAWIR ✓

M. BASRI ✓

✓ MUHAMMAD HASYIM ✓

DITETAPKAN DI PONRE  
PADA TANGGAL 19 APRIL 2012 M  
27 Juni 2012  
CAMAT  
GANTARANG  
ANDI ADE ARIADI S, STP, M, SI  
Pangkat: Pembina  
NIP. 19770728 1996 12 1 001

**PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR  
DJ.II/542/TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGARAAN KURSUS PRA  
NIKAH**



**KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN GANTARANG**



**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**  
**NOMOR : DJ.II/542 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah perlu dilakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**  
**TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH**  
**BAB I**



## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- (2) Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.
- (3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.
- (4) Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
- (5) Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.
- (6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.
- (7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARA KURSUS**

#### **Bagian Kesatu Penyelenggara**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama;



- (2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.
- (4) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

## **Bagian Kedua**

### **Sarana**

#### **Pasal 4**

Kementerian Agama menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul;

## **Bagian Ketiga**

### **Pembiayaan**

#### **Pasal 5**

Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari APBN dan APBD;

## **Bagian Keempat**

### **Sertifikasi**

#### **Pasal 6**

1. Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;
2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BP4 atau organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus;
3. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan;

## **BAB IV**

### **PESERTA KURSUS**

#### **Pasal 7**

Peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

## **BAB V**

### **MATERI DAN NARASUMBER**

#### **Pasal 8**

- (1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
  - a. Kelompok dasar

- b. Kelompok Inti
- c. Kelompok Penunjang
- (2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
- (3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 9**

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam Lampiran Peraturan ini;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

Direktur Jenderal,



**Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA**  
NIP. 195704141982031003

UNIVERSITAS  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



## **LAMPIRAN**

### **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA**

**NOMOR DJ.II/542 TAHUN 2013**

## **TENTANG**

### **PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Data statistik perkawinan di Indonesia per tahun rata-rata mencapai 2 (dua) juta pasang. Suatu angka yang sangat fantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa.

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan keluarga sakinah.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai  $\pm 200$  ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh sebab itu Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakir pada perceraian.

Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/lembaga dari Ormas Islam dan LSM yang menyelenggarakan kursus pra nikah, tentunya hal ini sangat menggembirakan karena badan/lembaga/ organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini. Dalam rangka tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi penyelenggara kursus pranikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kursus pra nikah dijabarkan melalui pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ini.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;

7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

### C. Tujuan

#### Tujuan Umum :

Mewujudkan Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

#### Tujuan khusus :

1. Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;
2. Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;

### D. Pengertian Umum

1. **Kursus Pra Nikah adalah** pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga
2. **Keluarga Sakinah adalah** Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat
3. **Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah** pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap badan/lembaga penyelenggara kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

4. **Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra nikah adalah** Pedoman tentang mekanisme pelayanan penyelenggaraan kursus pra nikah, terkait dengan standarnisasi materi, narasumber, badan/lembaga penyelenggara, sarana dan pembiayaan, sertifikasi dan kurikulum / silabus yang telah ditetapkan.

## **BAB II**

### **PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH**

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah.

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura dilaksanakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) merupakan contoh negara yang menyelenggarakan kursus pra nikah selama satu sampai tiga bulan dengan 8 kali pertemuan, sedangkan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) melaksanakan kursus pra nikah selama 3 bulan dengan 8 sampai 10 kali pertemuan. Adapun Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu libur yang dimiliki oleh peserta kursus yang umumnya pegawai atau buruh.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARA KURSUS PRA NIKAH**

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi

sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 kecamatan. Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya, BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

## **BAB IV**

### **AKREDITASI BAGI PENYELENGGARA KURSUS PRANIKAH**

#### **a. Akreditasi**

##### **1. Pengertian Akreditasi**

**Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah** pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

##### **2. Wewenang Akreditasi**

- a) Akreditasi di tingkat pusat merupakan kewenangan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
- b) Akreditasi di tingkat Provinsi merupakan kewenangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam;
- c) Akreditasi di tingkat Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan kantor Urusan Agama Kecamatan.

##### **3. Tujuan Akreditasi**

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah bertujuan untuk :

- a. Menentukan tingkat kelayakan suatu organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam menyelenggarakan kursus pranikah;
- b. Memperoleh gambaran tentang kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;



- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kursus pranikah yang dilaksanakan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam.

#### **4. Fungsi Akreditasi penyelenggara kursus pranikah**

Fungsi akreditasi penyelenggara kursus pranikah adalah untuk:

- a) Pengetahuan; yakni untuk mengetahui bagaimana kelayakan & kinerja badan/lembaga/organisasi penyelenggara kursus dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator program kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- b) Akuntabilitas; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat;
- c) Kepentingan pengembangan; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

#### **5. Karakteristik Sistem Akreditasi bagi Penyelenggara Kursus Pranikah**

Sistem akreditasi Penyelenggara kursus pranikah memiliki karakteristik :

- a) Keseimbangan fokus antara kelayakan dan kinerja badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- b) Keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal;
- c) Keseimbangan antara penetapan formal penyelenggaraan kursus pranikah dan umpan balik perbaikan.

#### **6. Komponen Penilaian Akreditasi**

Komponen penilaian Akreditasi penyelenggara kursus pranikah mencakup enam komponen yaitu:

- a) kurikulum dan proses belajar mengajar;
- b) administrasi dan manajemen;
- c) organisasi dan kelembagaan;
- d) sarana prasarana;
- e) ketenagaan;
- f) pembiayaan;
- g) peserta didik;

Masing-masing komponen dijabarkan ke dalam beberapa aspek yang dituangkan dalam beberapa indikator Instrumen Visitasi.

#### **7. Prosedur Akreditasi Penyelenggara Kursus Pranikah**

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah akan dilaksanakan dengan melalui prosedur/langkah-langkah sebagai berikut :

- a) organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah mengajukan permohonan akreditasi kepada Kementerian Agama RI;
- b) visitasi oleh asesor;



- a) penetapan hasil akreditasi;
- b) penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi.

## **8. Persyaratan Akreditasi Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah**

Penyelenggara kursus pranikah dapat mengajukan permohonan akreditasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a) memiliki surat keputusan/surat izin kelembagaan;
- b) memiliki tenaga pengajar/tutor yang memiliki kompetensi akademis maupun teknis yang dibuktikan dengan ijazah;
- c) memiliki kurikulum/silabi serta bahan ajar kursus pranikah sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Agama);
- d) memiliki sarana dan prasarana yang memadai ( ruang kantor/ruang belajar/ruang kursus, media/alat bantu pembelajaran, komputer/mesin tik, daftar registrasi peserta kursus pranikah, papan plank lembaga dan pengumuman, buku pengelolaan keuangan, jadwal penyelenggaraan kursus pranikah, file kepegawaian/tenaga pengajar;
- e) profil badan/lembaga.

## **9. Hasil Akreditasi**

Hasil akreditasi berupa sertifikat akreditasi penyelenggara kursus pranikah.

## **10. Mekanisme Penetapan Akreditasi**

Laporan tim visitasi (asesor) yang memuat hasil visitasi, catatan verifikasi, dan rumusan saran bersama dengan hasil evaluasi diri akan diolah oleh pelaksana akreditasi untuk menetapkan nilai akhir badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam sesuai dengan kondisi nyata. Nilai akhir akreditasi juga dilengkapi dengan penjelasan tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing komponen dan aspek akreditasi, termasuk saran-saran tindak lanjut bagi organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam rangka peningkatan kelayakan dan kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah di masa mendatang.

## **11. Masa Berlaku Akreditasi**

Masa berlaku akreditasi selama 2 tahun. Permohonan pengajuan akreditasi ulang dapat dilakukan 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Akreditasi ulang untuk perbaikan diajukan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak ditetapkan.

## **12. Mekanisme Pengawasan Akreditasi**

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan secara periodik terhadap jalannya kegiatan kursus pranikah yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah. Apabila dalam perjalanan 2 tahun didapati penyimpangan dari peraturan yang berlaku, pemerintah berhak memberikan sanksi berupa peringatan/ teguran terhadap penyelenggara kursus pranikah.

### **13. Kewenangan Pengawasan**

- a) Pengawasan di tingkat pusat dilakukan oleh Ditjen Bimbingan masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
- b) Pengawasan di tingkat Provinsi dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam
- c) Pengawasan ditingkat Kabupaten/kota dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

#### **b. Visitasi**

Visitasi merupakan rangkaian pelaksanaan akreditasi yang melekat dengan fungsi akreditasi dan penyelenggara kursus pranikah sebagai bahan/materi kelengkapan dan ketepatan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi. Visitasi dilaksanakan oleh Tim. Visitasi dilaksanakan jika suatu badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah telah mengajukan permohonan akreditasi dengan dilengkapi persyaratannya. Visitasi dilaksanakan segera (maksimal 1 bulan) setelah badan/lembaga mengajukan permohonan akreditasi.

##### **1. Pengertian Visitasi**

Visitasi adalah kunjungan tim ( asesor ) ke badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam rangka pengamatan lapangan, wawancara, verifikasi data pendukung, serta pendalaman hal-hal khusus yang berkaitan dengan komponen dan aspek akreditasi.

##### **2. Tujuan Visitasi**

- a. Tujuan visitasi adalah sebagai berikut:
- b. meningkatkan keabsahan dan kesesuaian data/informasi;
- c. memperoleh data/informasi yang akurat dan valid untuk menetapkan peringkat akreditasi;
- d. memperoleh informasi tambahan (pengamatan, wawancara, dan pencermatan data pendukung);
- e. mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun, dengan berpegang pada prinsip-prinsip: obyektif, efektif, efisien, dan mandiri.

##### **3. Pelaksana Visitasi**

Pelaksana Visitasi adalah asesor yang memiliki persyaratan dan kewenangan, sebagai berikut :

- a) Pegawai/Pejabat dilingkungan Kementerian Agama dalam hal ini unit yang terkait secara berjenjang yang memiliki kompetensi, integritas diri dan komitmen untuk melaksanakan tugasnya;

- b) memahami dan menguasai konsep/prinsip akreditasi termasuk mekanisme visitasi;
- c) bertanggung-jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan norma;
- d) bertanggung-jawab terhadap kerahasiaan hasil visitasi, dan melaporkannya secara obyektif ke pimpinan;
- e) memiliki wewenang untuk menggali data/-informasi dari berbagai sumber organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- f) diangkat sesuai surat tugas.

#### **4. Tata Cara Visitasi**

##### **a) Persiapan**

Untuk pelaksanaan visitasi, pelaksana akreditasi sebagaimana tersebut diatas menunjuk dan mengirimkan asesor. Asesor diangkat berdasarkan keputusan pimpinan tertinggi pada tingkatan pelaksana akreditasi untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme, prosedur, norma, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan;

##### **b) Verifikasi data dan informasi**

Asesor datang ke sekolah menemui pimpinan badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah menyampaikan tujuan dari visitasi, melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi atau cek-ulang terhadap data dan informasi kuantitatif maupun kualitatif. Kegiatan klarifikasi, verifikasi dan validasi dilakukan dengan cara membandingkan data dan informasi tersebut dengan kondisi nyata organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui pengamatan lapangan, observasi lokasi, wawancara.

##### **c) Klarifikasi Temuan**

Tim asesor melakukan pertemuan dengan pengurus badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah untuk mengklarifikasi berbagai temuan penting atau ketidak sesuaian yang sangat signifikan antara fakta lapangan dengan data/informasi yang terjaring dalam instrument visitasi.

##### **d) Penyusunan dan Penyerahan Laporan**

Asesor menyusun perangkat laporan, baik individual maupun tim yang terdiri dari:

1. tabel pengolahan data;
2. instrumen visitasi,
3. rekomendasi atas temuan,
4. berita acara visitasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.

#### **5. Larangan Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah**

Larangan bagi penyelenggara kursus pranikah yang akan divisitasi adalah sebagai berikut:

- a) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras melakukan kegiatan yang menghambat visitasi.

- b) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memanipulasi data dan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata.
- c) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memberikan apapun kepada asesor yang akan mengurangi objektivitas hasil visitasi

## **6. Pembiayaan Visitasi**

- a) Pembiayaan visitasi bersumber dari DIPA Ditjen Bimas Islam;
- b) Besarnya biaya visitasi ditentukan berdasarkan Surat Keputusan pimpinan pelaksana akreditasi;
- c) Komponen pembiayaan antara lain; honor, transportasi dan akomodasi yang memadai dan layak bagi tim asesor;
- d) Badan atau lembaga penyelenggara yang divisitasi tidak dikenakan biaya.

## **7. Instrumen Visitasi**

Instrumen visitasi adalah beberapa form isian yang harus diisi oleh lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan diakreditasi. Formulir isian tersebut terdiri dari; form pernyataan, form identitas, dan questioner, sebagaimana terlampir.

# **BAB V**

## **PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH**

### **I. Sarana Pembelajaran**

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah.

### **II. Materi dan Metode Pembelajaran**

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

### **III. Narasumber/pengajar**

- a. konsultan keluarga,
- b. tokoh agama,
- c. psikolog, dan
- d. profesional dibidangnya.

### **IV. Pembiayaan**

Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, dan APBD.

Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan

sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana APBN/APBD.

## **V. Sertifikasi**

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah.

Sertifikat disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang menyelenggarakan kursus pra nikah (pasal 6 ayat 1, 2, dan 3)

Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra nikah.

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumahtanggaan, sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/ kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

Direktur Jenderal,

**Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA**

NIP. 195704141982031003

## **Rujukan:**

1. PMA No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
2. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. PMA No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan GKS
4. Surat edaran Mendagri No. 400/564/III/Bangda Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan GKS
5. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Juklak pembinaan gerakan keluarga sakinah
6. Peraturan Dirjen tentang Kursus Pra Nikah
7. Tata Cara Perkawinan
8. Tata Cara Perceraian
9. Tata Cara Rujuk

# KURIKULUM DAN SILABUS

## KURSUS PRA NIKAH

NO.	MATA DIKLAT	KOMPETENSI	INDIKATOR	MATERI POKOK	URAIAN MATERI	JUMLAH	
						JPL	Perte muan
A. KELOMPOK DASAR							
1.	Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah					1	
2.	Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah					1	
3.	Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga			1. UU Perkawinan & KHI  2. UU KDRT  3. UU Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>- Konsep perkawinan</li><li>- Azas perkawinan</li><li>- Pembatasan poligami</li><li>- Batasan usia nikah</li><li>- Pembatalan perkawinan</li><li>- Perjanjian perkawinan</li><li>- Harta bersama</li><li>- Hak dan kewajiban</li><li>- Masalah status anak</li><li>- Perkawinan campuran</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengertian KDRT</li><li>- Bentuk-bentuk KDRT</li><li>- Faktor-faktor Penyebab KDRT</li><li>- Dampak KDRT</li><li>- Aturan Hukum</li><li>- Tanggungjawab Pemerintah dan keluarga</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengertian anak</li><li>- Hak anak</li><li>- Kedudukan anak dalam Islam</li></ul>	1	

4.	Hukum Munakahat	Memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang fikih munakahat	1. Menjelaskan Konsep dasar perkawinan 2. Menjelaskan tujuan dan hikmah perkawinan 3. Menjelaskan syarat dan rukun nikah 4. Menjelaskan akad nikah dan Ijab kabul 5. Menjelaskan Hak dan kewajiban suami isteri 6. Menjelaskan mu'asarah bil ma'ruf 7. Menjelaskan adab nikah 8. Menjelaskan Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak		2	
5.	Prosedur Pernikahan				1	
B. KELOMPOK INTI						
1.	Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu memahami fungsi-fungsi keluarga</li><li>- Mampu menjelaskan secara kontekstual fungsi-fungsi keluarga dengan pengalaman kehidupan perkawinan dan keluarga</li><li>- Mampu mengimplementasikan dalam kehidupan keluarga melalui action plan</li></ul>		1. Fungsi Agama.  2. Fungsi Reproduksi.	1.a. Memfungsikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan rumah tangga b. Fungsi pemeliharaan fitrah manusia c. Penguatan tauhid dengan pengembangan akhlakulkarimah	2
					Fungsi reproduksi yang didasarkan akad pertawinan	




				<p>7. Fungsi Sosial Budaya.</p> <p>7.a. Keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat</p> <p>b. keluarga sebagai lingkungan sosial budaya terkecil</p> <p>c. nilai-nilai keluarga mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat</p> <p>d. pengejawantahan nilai-nilai agama</p>	<p>b. Fungsi pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan keluarga</p> <p>c. Keseimbangan antara income dan pengeluaran</p> <p>d. Diperlukan tata kelola keuangan keluarga</p>		
2.	Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga			<p>1. Nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan mu'asyarah bil ma'ruf :</p> <p>2. Formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga</p> <p>3. Komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga</p>	<p>1.a. larangan menyia-nyiaakan suami/isteri</p> <p>b. Coolingdown</p> <p>c. menahan diri dan mencari solusi positif</p> <p>2.a. Saling memahami</p> <p>b. Saling menghargai</p> <p>3.a. Deskripsi komunikasi yang efektif</p> <p>b. Komunikasi dalam keluarga</p> <p>c. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>d. Macam-macam komunikasi dalam keluarga</p>	2	

3.	Manajemen Konflik dalam Keluarga		<p><b>1. Faktor penyebab konflik</b></p> <p>2. Tanda-tanda perkawinan dalam bahaya</p> <p>3. Solusi atau cara mengatasi konflik</p>	<p>1.a. perbedaan kepentingan dan kebutuhan</p> <p>b. komunikasi tidak efektif</p> <p>c. hambatan penyesuaian diri</p> <p>2.a. Cekcok terus menerus</p> <p>b. Cara komunikasi yang merusak hubungan</p> <p>3.a. Pasangan</p> <p>b. Keluarga besar masing-masing pihak</p> <p>c. Institusi konseling</p>	2	
4.	Psikologi perkawinan dan keluarga		<p>1. Pengertian/Deskripsi</p> <p>2. Upaya mencapai keluarga sakinah</p> <p>3. Membina hubungan dalam keluarga</p>	<p>1.a. Pengertian psikologi perkawinan</p> <p>b. Pengertian keluarga</p> <p>c. Ruang lingkup psikologi keluarga</p> <p>2.a. membentuk akhlak luhur</p> <p>b. menegakan rumah tangga Islami</p> <p>c. meningkatkan ibadah</p> <p>3.a. Harmonisasi suami-isteri</p> <p>b. Orang tua dan anak</p> <p>c. Anak dengan anak</p> <p>d. anak dan anggota keluarga lain</p> <p>e. kebersamaan dalam keluarga</p>	2	

**C. KELOMPOK PENUNJANG**

1.	Pendekatan Andragogi			- Konsepsi		1	
2.	Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching			-		1	
3.	Pre Test dan Post Test					1	
4.	Penugasan/Rencana Aksi					1	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

Wassalam

Direktur Jenderal,

  
**Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA**  
NIP. 195704141982031003



## **HASIL MUNAS BP4 KE XIV/2009**

### **JAKARTA, 1 – 3 JUNI 2009**

- AD/ART
- Pokok-pokok program kerja 2009
  - Rekomendasi
- Keputusan Menteri Agama ttg Penetapan Pengurus BP4 2009-2014
  - Telaah Tupoksi BP4

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL  
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN  
PERKAWINAN (BP4) KE XIV TAHUN 2009  
NOMOR 26/2-P/BP4/VI/2009**

**TENTANG  
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN**

**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM**

**MUSYAWARAH NASIONAL BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN KE XIV**

Menimbang : a. bahwa BP4 sebagai lembaga mitra Departemen Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah;

b. bahwa di era pasca reformasi saat ini peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

c. bahwa untuk melaksanakan misi tersebut, upaya BP4 memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa penasihatan, pembinaan, pelestarian, mediasi dan advokasi perkawinan serta memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, ormas Islam, Konselor dan Penasihat Perkawinan untuk lebih proaktif memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya eksistensi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada butir a sampai c tersebut di atas, Munas BP4 ke XIV di Jakarta, memandang perlu menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga periode tahun 2009-2014.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 1961 jo No. 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 Pusat;

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 Pusat;

4. Hasil-hasil Munas BP4 Pusat Tahun 2009.

Memperhatikan : Pengarahan yang disampaikan oleh :

1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama.

2. Staf Ahli Bidang Agama Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia

3. Direktur Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

Maka setelah mempelajari secara mendalam pengarahan-pengarahan tersebut dan mempertimbangkan usulan-usulan, saran-saran dan pendapat para peserta, maka Munas BP4 ke XIV:

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) MUNAS KE XIV TAHUN 2009, SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI KEPUTUSAN INI.**

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 3 Juni 2009

**Ketua Sidang**

**ttd**

**Drs. H. Moh. Muchtar Ilyas**

**Sekretaris Sidang**

**ttd**

**Drs. H. Najib Anwar, MH**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ANGGARAN DASAR BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)

### MUKADDIMAH

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."* (QS. 30 Ar-Rûm: 21).

Bahwa untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihatn perkawinan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumahtangga/keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Sejak BP4 di dirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihatn Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain; tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan sirri, perkawinan mut'ah, polighami, dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, dan seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai.

Tuntutan BP4 ke depan peran dan fungsinya tidak sekadar menjadi lembaga penasihatn tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi kemandirian organisasi secara profesional, independent, dan bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Sebagai konsekwensi dari kemandirian dan profesionalitas, maka BP4 mengemban tugas yang tidak kecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga yang semakin berkembang, perlu sumberdaya manusia yang dibutuhkan terkait dengan mediasi, advokasi dan konsultan perkawinan. AD/ART ditujukan bagi peningkatan pelayanan organisasi yang bersifat responsif terhadap segala persoalan perkawinan dan keluarga yang muncul dalam masyarakat



## **BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN SIFAT**

### Pasal 1

Organisasi ini bernama Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan disingkat dengan BP4.

### Pasal 2

BP4 Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

### Pasal 3

BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### Pasal 4

BP4 berdasarkan Islam dan Berazaskan Pancasila.

### Pasal 5

Tujuan BP4 untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spirituil.

## **BAB III UPAYA DAN USAHA**

### Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan 5, BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan, penasihat, dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga **di peradilan agama**;
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
7. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;

8. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga;
12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### Pasal 7

- (1) Organisasi BP4 disusun sesuai dengan jenjang administrasi pemerintah mulai dari Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
- (2) Organisasi BP4 Pusat mempunyai bidang-bidang sebagai berikut :
  - a. Pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan SDM untuk pembinaan Keluarga Sakinah;
  - b. Konsultasi Hukum dan Penasihatatan Perkawinan dan keluarga;
  - c. Bidang Advokasi dan Mediasi.
  - d. Komunikasi dan Informasi;
  - e. Pendidikan dan kesejahteraan usia dini, **pemuda, remaja dan lansia**;
- (3) Organisasi di tingkat propinsi sampai Kecamatan mempunyai bidang-bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2) atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dan disesuaikan dengan kemampuan organisasi;
- (4) BP4 Pusat sampai Tingkat Kecamatan memiliki tenaga Konselor dan Penasihat Perkawinan dan Keluarga.

## **BAB V PENGURUS**

### Pasal 8

- (1) Menteri Agama RI sebagai Pembina BP4 tingkat Pusat, Gubernur sebagai Pembina BP4 tingkat Propinsi, Bupati/Walikota sebagai Pembina BP4 di tingkat Kabupaten/Kota, Camat sebagai Pembina di tingkat Kecamatan;
- (2) Pejabat dari instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan terkait dengan misi BP4 dapat diangkat sebagai pengarah pada setiap jenjang kepengurusan;
- (3) Dewan Pertimbangan BP4 terdiri dari ulama, tokoh organisasi Islam, pakar dan cendekiawan;
- (4) Pengurus BP4 terdiri dari ketua umum, ketua-ketua, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara, wakil bendahara, serta bidang-bidang;
- (5) Pengurus BP4 sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah pribadi muslim dan muslimah dari instansi pemerintah, ormas Islam, tenaga professional, serta tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu terkait;
- (6) Masa bakti pengurus di semua tingkat adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali ketua umum hanya dapat dipilih satu periode berikutnya.

## **BAB VI KEUANGAN**

### Pasal 9

Keuangan organisasi diperoleh dari:

- a. Bantuan Pemerintah;
- b. Bantuan Lembaga dari dalam maupun luar negeri yang tidak mengikat;
- c. Infaq, shadaqah dan sumbangan lainnya;
- d. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT**

### Pasal 10

- (1) Musyawarah terdiri atas:
  - a. Musyawarah tingkat Nasional, Tingkat Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Kecamatan;
  - b. Musyawarah diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun, dilaksanakan secara berjenjang dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
  - c. Musyawarah dianggap sah jika dihadiri oleh lebih separoh dari peserta.
- (2) Rapat terdiri atas Rapat Kerja Nasional, Rapat kerja Daerah dan Rapat Kerja Pengurus :
  - a. Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode;
  - b. Rapat pengurus terdiri atas rapat pengurus pleno dan rapat pengurus harian yang dilaksanakan sesuai dengan keperluan.

### Pasal 11

- (1) Keputusan tertinggi berada pada Musyawarah Nasional;
- (2) Keputusan berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat;
- (3) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

### Pasal 12

Pada setiap musyawarah dan rapat, setiap anggota mempunyai hak suara yang sama.

## **BAB VIII PENGESAHAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

### Pasal 13

- (1) Anggaran Dasar disusun dan disahkan oleh Musyawarah Nasional yang dihadiri oleh paling kurang dua pertiga dari peserta yang hadir;
- (2) Anggaran Dasar hanya dapat diubah oleh Musyawarah Nasional tersebut pada ayat (1) dengan mendapat suara paling kurang dua pertiga dari peserta yang hadir.

## **BAB IX PEMBUBARAN**

### Pasal 14

- (1) Organisasi ini hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2);
- (2) Jika organisasi ini dibubarkan, maka segala hak miliknya diserahkan kepada organisasi sosial Islam yang ditunjuk oleh Menteri Agama atas usul Musyawarah Nasional tersebut pada ayat (1) pasal ini.

## **BAB X PENUTUP**

- (1) Anggaran Dasar ini disahkan oleh Musyawarah Nasional BP4 ke XIV tanggal 3 Juni 2009 di Jakarta;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Rangka.

### **BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN**

**Ketua Sidang**

ttd

**Drs. H. Moh. Muchtar Ilyas**

**Sekretaris Sidang**

ttd

**Drs. H. Najib Anwar, MH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) PUSAT**

**BAB 1  
KEPENGURUSAN**

Pasal 1

- (1) Syarat-syarat menjadi pengurus :
  - a. Beragama Islam
  - b. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun
  - c. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4
  - d. Berakhlak baik
  - e. Memiliki kompetensi dibidang tugas dan fungsi BP4
- (2) Kewajiban Pengurus
  - a. Melaksanakan usaha-usaha untuk mencapai tujuan organisasi
  - b. Menjaga nama baik organisasi
  - c. Membina pengurus pada tingkatan di bawahnya
  - d. Membina keluarga dan masyarakat
- (3) Hak Pengurus
  - a. Hak menyampaikan pendapat
  - b. Hak memilih dan dipilih
  - c. Hak memberi suara
- (4) Berhenti menjadi pengurus
  - a. Atas permintaan sendiri
  - b. Meninggal dunia
  - c. Diberhentikan oleh Rapat Pengurus Pleno yang sah disebabkan kehilangan syarat keanggotaan dan atau berbuat hal-hal yang dapat merusak nama baik organisasi
  - d. Meninggalkan tugas atau tidak dapat menjalankan tugas karena alasan-alasan tertentu yang tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas selama dua tahun berturut-turut
  - e. Anggota yang keberatan atas pemberhentiannya berhak naik banding kepada pengurus yang setingkat lebih tinggi dan keputusannya merupakan keputusan akhir.
- (5) Pengurus yang berhenti dengan alasan seperti tersebut pada ayat (4) dapat diganti posisinya oleh yang lain dengan mekanisme pergantian antar waktu.

Pasal 2

- (1) Pengurus BP4 Pusat ditetapkan oleh Menteri Agama atas usul Musyawarah Nasional BP4.
- (2) Pengurus BP4 tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur atau Kepala Kanwil Depag Provinsi atas usul hasil Musyawarah Wilayah
- (3) Pengurus BP4 tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Kandepag Kabupaten/Kota atas usul hasil Musyawarah Daerah
- (4) Pengurus BP4 tingkat Kecamatan ditetapkan Camat atau Kepala KUA Kecamatan atas usul hasil Musyawarah Kecamatan.

### Pasal 3

- (1) Penetapan pengurus dapat dilakukan secara langsung atau dengan formatur;
- (2) Pengisian lowongan dan atau penambahan pengurus dipilih oleh Rapat Pengurus Pleno masing-masing tingkat organisasi.

### Pasal 4

- (1) Pengurus berkewajiban menjalankan keputusan organisasi;
- (2) Pengurus mengadakan pembagian kerja sehingga masing-masing mempunyai tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (3) Ketua Umum bertanggung jawab atas jalannya organisasi baik keluar maupun ke dalam;
- (4) Untuk kelancaran tugas sehari-hari Ketua Umum dibantu oleh Ketua-Ketua;
- (5) Ketua Umum/Ketua memimpin musyawarah dan rapat-rapat;
- (6) Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh salah satu Ketua/ Sekretaris Umum/Ketua Bidang yang dipilih oleh rapat;
- (7) Sekretaris Umum membantu tugas-tugas pimpinan dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kesekretariatan;
- (8) Bendahara membantu pimpinan dan bertanggung jawab atas pengurusan keuangan;
- (9) Bendahara dan Wakil Bendahara mengadakan pembagian tugas dalam menyelenggarakan pembukuan keuangan dan menghimpun serta memelihara kekayaan organisasi;
- (10) Surat keluar ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Umum, dan hal-hal yang menyangkut teknis cukup ditandatangani Sekretaris Umum.

## **BAB II KEUANGAN**

### Pasal 5

- (1) Keuangan BP4 bersumber dari bantuan yang diterima dari instansi pemerintah, lembaga bantuan dalam dan luar negeri, donatur, dermawan, masyarakat dan pihak-pihak lain secara sah dan usaha BP4;
- (2) Setiap tingkatan organisasi menyusun Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran.

## **BAB III RAPAT**

### Pasal 6

- (1) Rapat Pengurus Pleno diadakan paling kurang setiap tiga bulan sekali;
- (2) Rapat Pengurus Harian dan rapat lainnya diserahkan pada kebijaksanaan pengurus setiap tingkatan organisasi;
- (3) Rapat evaluasi diadakan setiap 1 tahun sekali.

## **BAB IV KONSELOR DAN PENASIHAT PERKAWINAN**

### Pasal 7

- (1) Konselor dan Penasihat Perkawinan diangkat dan diberhentikan oleh pengurus masing-masing tingkatan organisasi
- (2) Konselor dan Penasihat Perkawinan terdiri atas ahli agama, tenaga profesional, mediator perkara di Pengadilan Agama, tokoh masyarakat, dan para ahli di bidang terkait;
- (3) Konselor dan Penasihat Perkawinan disyaratkan :
  - a. Berakhlak baik;
  - b. Wajib menyimpan rahasia orang yang menjadi klien;
  - c. Sudah mendapat pelatihan dalam penasihatn;
  - d. Berumur paling kurang 30 tahun;
  - e. Keluarganya patut diteladani;
  - f. Memiliki kompetensi dibidang penasihatn perkawinan dan keluarga.

## **BAB V KETENTUAN-KETENTUAN**

### Pasal 8

- (1) Uraian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan kerja pengurus BP4 diatur dengan ketetapan Ketua Umum BP4 Pusat berdasarkan hasil rapat pleno BP4 Pusat;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Ketua Umum berdasarkan hasil Rapat Pleno BP4 Pusat.

## **BAB VI PENUTUP**

### Pasal 9

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan oleh Musyawarah Nasional BP4 ke XIV tanggal 3 Juni 2009.

## **BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN**

**Ketua Sidang**

ttd

**Drs. H. Moh. Muchtar Ilyas**

**Sekretaris Sidang**

ttd

**Drs. H. Najib Anwar, MH**



**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL  
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN  
PERKAWINAN (BP4) KE XIV TAHUN 2009  
NOMOR 27/2-P/BP4/VI/2009**

**TENTANG**

**POKOK-POKOK PROGRAM KERJA  
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN TAHUN 2009**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**MUSYAWARAH NASIONAL BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN KE XIV TAHUN 2009,**

- Menimbang : a. bahwa BP4 sebagai lembaga penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan adalah mitra Departemen Agama dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah;
- b. bahwa peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam memberikan motivasi kepada para keluarga untuk menanamkan, melaksanakan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran agama dan akhlaqul karimah;
- c. bahwa untuk melaksanakan misi tersebut, upaya BP4 antara lain mengarahkan dan memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, LSM, Konselor dan Penasihat Perkawinan untuk lebih proaktif demi terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah;
- d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada butir a sampai c tersebut di atas, Munas ke XIV BP4 yang diselenggarakan pada tanggal 1 s.d. 3 Juni 2009 di Jakarta, memandang perlu menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja periode tahun 2009-2014.
- Mengingat : 1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 1961 jo No. 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 Pusat;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 Pusat;
6. Hasil-hasil Munas BP4 Pusat tahun 2009.
- Memperhatikan : Pengarahan-pengarahan yang disampaikan oleh :
1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama.
2. Staf Ahli Bidang Agama Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia
3. Direktur Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

Maka setelah mempelajari secara mendalam pengarahan-pengarahan seperti tersebut diatas dan setelah mempertimbangkan usul, saran dan pendapat para peserta Munas BP4 ke XIV:

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : POKOK-POKOK PROGRAM KERJA BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) MASA BHAKTI 2009-2014 SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI KEPUTUSAN INI.**

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada Tanggal: 3 Juni 2009

**Ketua Sidang**

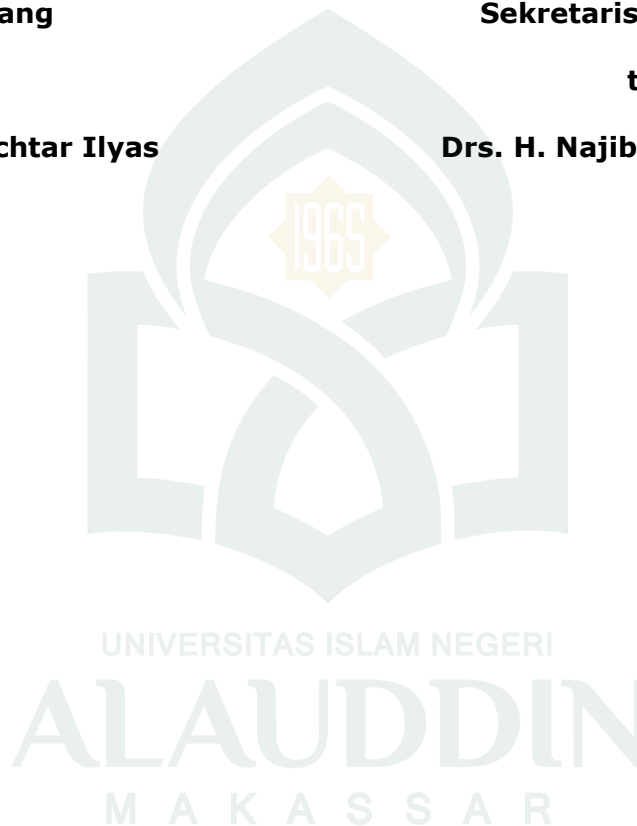
**ttd**

**Drs. H. Moh. Muchtar Ilyas**

**Sekretaris Sidang**

**ttd**

**Drs. H. Najib Anwar, MH**



**POKOK-POKOK PROGRAM KERJA  
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)  
(Periode 2009-2014)**

## **I. PENDAHULUAN**

1. BP4 sebagai lembaga mitra kerja Departemen Agama bertujuan mempertinggi mutu perkawinan dalam mewujudkan rumahtangga yang bahagia dan sejahtera yaitu keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan mengembangkan Program Gerakan Keluarga Sakinah;
2. Bahwa untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah diperlukan adanya bimbingan yang terus-menerus dari Konselor dan Penasihat Perkawinan secara professional;
3. Untuk menghadapi tuntutan perubahan masyarakat dewasa ini dan meningkatnya, arus informasi yang menimbulkan berbagai dampak terhadap kehidupan keluarga, peran BP4 perlu ditingkatkan dengan menyusun langkah program kongkrit untuk mencapai tujuan di atas.

## **II. VISI DAN MISI**

**Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.**

**Sedangkan Misi BP4 adalah:**

1. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi;
2. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

## **III. Nilai-nilai Dasar Organisasi:**

1. Keikhlasan
2. Integritas
3. Profesional
4. Inovatif
5. Amanah

## **IV. SWOT ANALISIS**

### **A. KEKUATAN**

1. Dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang mendukung organisasi BP4.
2. Dukungan kuat dari Departemen Agama sebagai mitra kerja BP4 dan instansi terkait dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan,
3. Ketersediaan tenaga ahli di bidangnya untuk mendukung tugas dan fungsi BP4 di Pusat dan Daerah

4. Perhatian dan dukungan yang besar dari pemerintah dan masyarakat akan terwujudnya keluarga **yang sehat sejahtera lahir dan batin, yang diliputi suasana sakinah mawaddah warahmah.**

## **B. KELEMAHAN**

1. Posisi/status BP4 terkait dengan bantuan APBN dan APBD belum jelas;
2. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 karena masih lemahnya SDM serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung;
3. Kemampuan manajerial pengurus BP4 yang belum memadai;
4. Sosialisasi terhadap keberadaan dan peran BP4 masih kurang, sehingga masyarakat belum mengenal dan tidak dapat memanfaatkan pelayanan konsultasi BP4.

## **C. PELUANG**

1. Besarnya harapan dan dukungan masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah;
2. Kuatnya dukungan dari instansi pemerintah terhadap lembaga BP4 dalam mewujudkan institusi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam UU nomor 1 Tahun 1974;
3. Terbukanya hubungan kerjasama yang sinergis dengan berbagai organisasi/lembaga kemasyarakatan yang memiliki visi, misi dan tujuan yang sama;
4. Tingginya partisipasi dari instansi/lembaga lintas sektoral dan Ormas Islam.

## **D. TANTANGAN**

1. Perkembangan globalisasi serta meningkatnya pengaruh teknologi informasi yang membawa dampak bagi kehidupan masyarakat dan keluarga seperti meluasnya gaya hidup hedonistik, materialistik, dan konsumerisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.
2. Makin meningkatnya keluarga bermasalah yang memerlukan bantuan konseling.
3. Masih tingginya angka perceraian dan nikah di bawah tangan/sirri.

## **V. STRATEGI KEBIJAKSANAAN**

1. Memperkuat dan memberdayakan kelembagaan (institutional capability building) BP4 dari tingkat pusat sampai ke tingkat kecamatan;
2. Menjadikan Keputusan Munas BP4 KE XIV sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan fungsi BP4;
3. Meningkatkan instansi/lembaga lintas sektoral dan Ormas Islam;
4. Mengembangkan fungsi BP4 sebagai crisis center (pusat penanggulangan krisis);
5. Menjadikan seluruh kegiatan BP4 sebagai bagian dari Gerakan Keluarga Sakinah.

## **VI. PROGRAM**

### **A. PROGRAM ORGANISASI**

1. Mereposisi organisasi sesuai dengan keputusan MUNAS BP4 ke XIV tahun 2009 di Jakarta;
2. Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi BP4 pada semua tingkatan organisasi;
3. Membentuk pusat penanggulangan krisis Keluarga (family crisis center);
4. Melaksanakan konsolidasi organisasi BP4 mulai dari **tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dengan mengadakan Musda I, II, Musyawarah Kecamatan** dan Musyawarah Konselor dan Penasihat Perkawinan Tingkat Kecamatan; serta meningkatkan tertib administrasi organisasi masing-masing jenjang;
5. Mengusahakan anggaran BP4 melalui jasa profesi penasihatan, dana bantuan Pemerintah, lembaga donor agensi nasional dan Internasional, swasta, infak masyarakat, dan dari sumber lain yang sah sesuai dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi;
6. Mengupayakan payung hukum organisasi BP4 melalui undang-undang terapan peradilan agama bidang perkawinan dan SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Mahkamah Agung;
6. Menyelenggarakan evaluasi program secara periodik tiap tahun melalui Rakernas.
7. Menyelenggarakan Munas BP4 XV tahun 2014.
8. Membuat website BP4.

### **B. PROGRAM KERJA BIDANG**

#### **1. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan pengembangan SDM**

- a. Menyelenggarakan orientasi Pendidikan Agama dalam Keluarga, Kursus Calon Pengantin, Pendidikan Konseling untuk Keluarga, Pembinaan Remaja Usia Nikah, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Upaya Peningkatan Gizi Keluarga, Reproduksi Sehat, Sanitasi Lingkungan, Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS;
- b. Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator;
- c. Menyempurnakan buku-buku pedoman pembinaan keluarga sakinah.

#### **2. Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihatan Perkawinan dan Keluarga**

- a. Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihatan perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi
- b. Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara-perkara di Pengadilan Agama;
- c. Mengupayakan kepada Mahkamah Agung (MA) agar BP4 ditunjuk menjadi lembaga pelatih mediator yang terakreditasi;
- d. Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan;
- e. Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi.

- f. Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4;
- g. Menyelenggarakan konsultasi jodoh.
- h. Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus (hotline), TV, Radio, Media Cetak dan Media elektronika lainnya;
- i. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang Penasihatn Perkawinan dan Keluarga;
- j. Menerbitkan buku tentang Kasus-kasus Perkawinan dan Keluarga.

### **3. Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi**

- a. Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang:
  - 1) Penyuluhan Keluarga Sakinah;
  - 2) Undang-undang, Perkawinan, Hukum Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, undang-undang PKDRT dan undang-undang terkait lainnya;
  - 3) Pendidikan Keluarga Sakinah.
- b. Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi Pembinaan Keluarga Sakinah melalui:
  - 1) Media cetak
  - 2) Media elektronikal
  - 3) Media tatap muka
  - 4) Media percontohan/keteladanan
- c. Mengusahakan agar majalah Perkawinan dan Keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan Perpustakaan BP4 di tingkat Pusat dan Daerah.

### **4. Bidang Advokasi dan Mediasi**

- a. Menyelenggarakan advokasi dan mediasi;
- b. Melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga;
- c. Mengembangkan kerjasama fungsional dengan MA, PTA dan PA.

### **5. Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Pembinaan Anak, Remaja dan Lansia**

- a. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kantor Kependudukan /BKKBN dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah teladan;
- b. Menerbitkan buku tentang Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional.
- c. Menyiapkan pedoman, pendidikan dan perlindungan bagi anak, remaja, dan lansia;

- d. Melaksanakan orientasi pembekalan bagi pendidikan anak dalam keluarga;
- e. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak, remaja dan lansia.

**Ketua Sidang**

**ttd**

**Drs. H. Moh. Muchtar Ilyas**

**Sekretaris Sidang**

**ttd**

**Drs. H. Najib Anwar, MH**





**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL  
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN  
PERKAWINAN (BP4) KE XIV  
NOMOR 28/2-P/BP4/VI/2009**

**TENTANG**

**REKOMENDASI  
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)  
MASA BAKTI 2009-2014**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**MUSYAWARAH NASIONAL BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN KE XIV**

- Menimbang : a. bahwa BP4 sebagai lembaga penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan adalah mitra Departemen Agama dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah;
- b. bahwa peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam memberikan motivasi kepada para keluarga untuk menanamkan, melaksanakan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran agama dan akhlaqul karimah;
- c. bahwa untuk melaksanakan misi tersebut, upaya BP4 antara lain memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa penasihat, pembinaan, pelestarian, mediasi dan advokasi perkawinan serta mengarahkan dan memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, LSM, Konselor dan Penasihat Perkawinan untuk lebih proaktif demi terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah;
- d. bahwa untuk melaksanakan seperti apa yang dimaksud pada butir a sampai c tersebut di atas, Munas ke XIV BP4 yang diselenggarakan pada tanggal 1 s.d. 3 Juni 2009 di Jakarta, memandang perlu menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja periode tahun 2009-2014.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 1961 jo No. 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 Pusat;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 Pusat;
4. Hasil-hasil Munas BP4 Tahun 2009.
- Memperhatikan : Pengarahan-pengarahan yang disampaikan oleh :
1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama.
2. Staf Ahli Bidang Agama Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia
3. Direktur Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

Maka setelah mempelajari secara mendalam pengarahan-pengarah seperti tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan usul, saran dan pendapat para peserta Munas ke XIV BP4 :

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : REKOMENDASI BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) MASA BAKTI 2009-2014 SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI KEPUTUSAN INI.**

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 3 Juni 2009

**Ketua Sidang,**

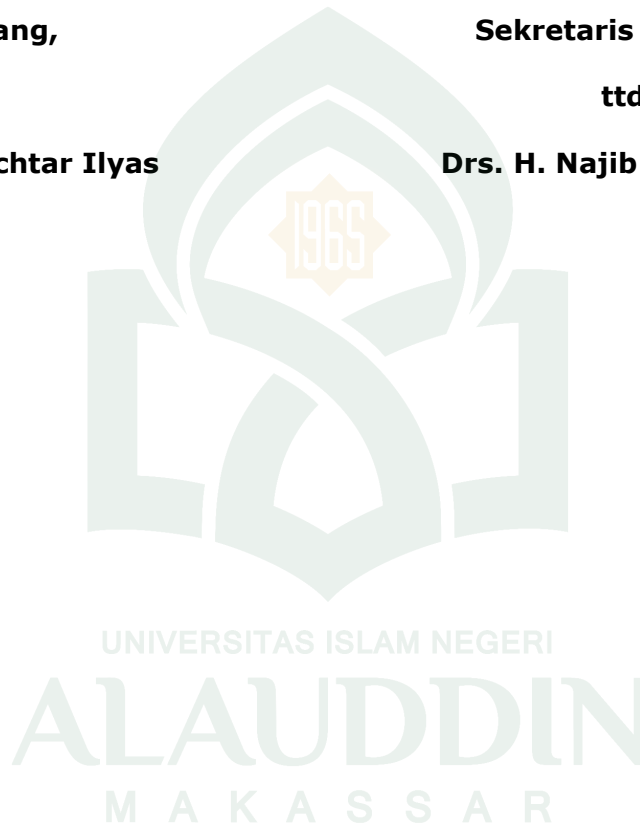
**ttd**

**Drs. H. Moh. Muchtar Ilyas**

**Sekretaris Sidang,**

**ttd**

**Drs. H. Najib Anwar, MH**



**REKOMENDASI  
MUSYAWARAH NASIONAL  
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN**

Pembangunan keluarga bahagia sejahtera diarahkan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah dengan ketahanan yang andal sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa yang merupakan inti kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar mampu mendukung pembangunan nasional. Upaya ini diselenggarakan melalui peningkatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia melalui pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, dan pendidikan formal. Tantangan yang dihadapi adalah kedalaman pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam yang masih kurang.

Untuk mencapai hal tersebut Munas ke XIV BP4 Tahun 2009 merekomendasikan kepada:

**1. Pemerintah:**

- a. Mendiknas menambah jam pelajaran agama bagi sekolah-sekolah umum pada semua jenjang pendidikan.
- b. Menteri Agama mengalokasikan anggaran bantuan untuk kegiatan penasihatan perkawinan.
- c. Departemen Agama mewajibkan setiap pasangan calon pengantin untuk mengikuti **kursus** calon pengantin.

**2. Aparat **penegak hukum**:**

- a. Melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor **44** Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
- b. Menghukum pelaku kekerasan dan pelecehan seksual terhadap wanita dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Meningkatkan pemberantasan VCD porno, film, majalah, sinetron yang berbau porno dan memberikan sanksi berat kepada pengedar dan produsernya.
- d. Membongkar sindikat peredaran NAPZA dan obat terlarang secara terus menerus.
- e. Memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku pernikahan mut'ah.

**3. KPI dan LSF:**

Mengawasi secara terus-menerus tayangan-tayangan TV yang tidak sesuai dengan moral agama dan kepribadian bangsa.

4. Masyarakat:

- a. Meningkatkan fungsi masjid dan musholla sebagai tempat pembinaan umat.
- b. Memperhatikan pengawasan terhadap pergaulan anak muda.

**Ketua Sidang,**

**Ttd**

**Drs. H. Moh. Muchtar Ilyas**

**Sekretaris Sidang,**

**ttd**

**Drs. H. Najib Anwar, MH**



**KEPUTUSAN  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 114/2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGURUS  
BADAN PENASEHATAN, PEMBINAAN DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) PUSAT  
MASA BAKTI TAHUN 2009 - 2014**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Kepengurusan BP4 Pusat masa bakti tahun 2004-2009 yang diangkat dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 417 Tahun 2004 dipandang perlu mengangkat Kepengurusan Baru BP4 Pusat masa bakti Tahun 2009 - 2014;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengurus BP4 Pusat masa bakti Tahun 2009 - 2014;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2004;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 jo Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4).
- Memperhatikan : Hasil Munas ke XIV BP4 tanggal 1 s.d. 3 Juni 2009.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PENGURUS BADAN PENASEHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) PUSAT MASA BAKTI 2009 - 2014.**
- Pertama : Menetapkan Pengurus BP4 Pusat Masa Bakti Tahun 2009-2014 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pengurus, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Pengurus mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 Anggaran Rumah Tangga BP4.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Juli 2009

MENTERI AGAMA R.I.

ttd

**H. Muhammad M. Basyuni**

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
5. Sekjen Dep. Agama;
6. Inspektur Jendral Dep. Agama;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 114/2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGURUS  
BADAN PENASEHATAN, PEMBINAAN DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) PUSAT  
MASA BAKTI TAHUN 2009 - 2014**

Pembina	: 1. Ketua Mahkamah Agung 2. Menteri Agama RI 3. Menteri Dalam Negeri 4. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Pengarah	: 1. Direktur Jenderal Bimas Islam 2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama 3. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama 5. Ketua Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
Dewan Pertimbangan	: 1. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia 2. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 3. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 4. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Depag. 5. Ketua Dharma Wanita Sub Unit Dep. Agama 6. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU 7. Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah 8. Prof. Dr. Bagir Manan 9. Prof. Dr. Hj. Zakiyah Darajat, MA 10. Prof. Dr. H. A. Mubarak, MA 11. Prof. Dr. H. M. Mashuri Na'im, MA 12. Prof. Dr. H. A. Sutarmadi, MA 13. Prof. Dr. Hj. Nabila Lubis 14. Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan, MA 15. Drs. H. M. Adnan Harahap
Ketua Umum	: Drs. H. Taufiq, SH, MH
Ketua I	: Drs. H. Mubarak, M.Si
Ketua II	: Drs. H. M. Goodwill Zubir
Ketua III	: Drs. H. Tulus
Ketua IV	: Dr. Hj. Nurhayati Djamas, MA
Ketua V	: Dra. Hj. Zubaidah Muchtar
Sekretaris Umum	: Drs. H. Moh. Muchtar Ilyas
Sekretaris	: 1. Drs. H. Mudzakir, MM 2. Drs. H. Najib Anwar, MH
Bendahara Umum	: Prof. Dr. Hj. 'Aliyah Hamka
Bendahara	: 1. Dra. Hj. Nur Afwa Sofia 2. Dra. Hj. Nilmayetty

**Bidang-Bidang :**



1. Bidang Konseling, Penasehatan  
Perkawinan dan Keluarga

Ketua : Drs. H. Juraidi, MA  
Anggota : 1. H. Maizar, SH.,MH  
2. Drs. H. Muhail, SH  
3. Drs. H. Muhda Hadisaputro, SH  
4. Jajang Ridwan, MA

2. Bidang Advokasi, Mediasi dan  
Konsultasi Hukum

Ketua : Dr. H. Wahiduddin Adam  
Anggota : 1. Drs. H. Kadi Sastrowirjono, SH  
2. H. Yulianto Sahyu, SH.,MH  
3. Dra. Hj. Jazimah, MA  
4. H. Soefyanto, SH.,MH

3. Bidang Humas, Publikasi dan Kerjasama  
Dalam dan Luar Negeri

Ketua : H. Ahmed Mahfud  
Anggota : 1. Dr. H. Muchtar Ali, M.Hum  
2. Dr. Hj. Masitah Husnan  
3. H. M. Adib Machrus  
4. Hj. Syarifah, Lc

4. Bidang Kesejahteraan Keluarga, Perlindungan  
Usia Dini, Pemuda dan Lansia

Ketua : Drs. KH. Nuril Huda  
Anggota : 1. Drs. H. Helly Sukrin  
2. Drs. H. Mashuri, M.Si  
3. Hj. Lilih Rahmawati, M.Ag  
4. Burhanuddin, SHi

5. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah  
dan Pengembangan SDM

Ketua : Dra. Hj. Nurmi Akma, MA  
Anggota : 1. Dr. H. Aceng Rahmat, M.Pd  
2. Dr. Popy Puadah, M.Pd  
3. Dra. Hj. Fadilah Ahmad  
4. Drs. H. Muhyiddin, MM

6. Bidang Usaha

Ketua : H. Amril Juri  
Anggota : 1. Drs. H. Moch. Kamalillah  
2. H. Sarisman  
3. Drs. H. Sumarta

MENTERI AGAMA R.I.

ttd

**H. Muhammad M. Basyuni**

## **Telaahan Tugas Pokok dan Fungsi BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)**

### **1. Sejarah Singkat**

Setelah antara tahun 1950 s.d 1954 dilakukan penilaian terhadap statistic NTR seluruh Indonesia, diketemukan fakta-fakta yang menunjukkan labilnya perkawinan di Indonesia, dimana angka cerai/thalak di banding nikah mencapai 60% sampai 70%. Hal tersebut mendorong H.S.M. Nasaruddin Latif untuk menggerakkan lahirnya organisasi penasehat perkawinan yang dianggapnya semacam dokter perkawinan bagi pasangan suami-isteri. Maka pada bulan April 1954 di setiap KUA se-Jakarta dibentuk SPP (Seksi Penasehat Perkawinan), kemudian tahun 1956 dirubah menjadi P-5 (Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang bergerak dibidang usaha mengurangi perceraian dan mempertinggi nilai-nilai perkawinan. Hal ini mendapat sambutan luas di Depag Jatim, Kalimantan, Lampung, dan Sumsel.

Bersamaan dengan itu di Bandung pada tanggal 3 Oktober 1954 mendirikan BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang didukung oleh organisasi-organisasi wanita dan pemuka-pemuka masyarakat yang menyebar ke Jateng. Langkah tersebut diikuti oleh DIY tahun 1957 dengan mendirikan BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga) yang menyebar ke tiap Kecamatan dan Kabupaten.

Maka pada tanggal 3 Januari 1960 ke tiga organisasi tersebut melebur menjadi satu nama yang bersifat Nasional dengan nama BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian), yang dikukuhkan oleh Menteri Agama dengan SK Menag No. 85 tahun 1961 yang mengakui bahwa BP4 satu-satunya badan yang berusaha dibidang penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian dalam rangka melaksanakan Penetapan Menag No. 53 tahun 1958 pasal 4 angka 3 huruf f, angka 4 huruf e dan pasal 11 angka 5 huruf a. Dengan Keputusan Menag itu BP4 adalah Badan Semi Resmi.

### **1. Tugas Pokok, Fungsi dan Kedudukan BP4 saat ini**

BP4 didirikan pada tanggal 8 Juli 1961 yaitu ketika organisasi ini meleburkan diri menjadi satu organisasi yang bersifat Nasional dengan nama Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4). Berdirinya BP4 ini telah dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961.

Bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan segala peraturan pelaksanaannya dipandang perlu untuk menegaskan kembali pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha dibidang penasihat perkawinan dan pengurangan angka perceraian, maka telah diterbitkan Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan badan penasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian. Dalam keputusan ini telah ditegaskan bahwa kedudukan BP4 sebagai badan semi resmi pemerintah yang bertugas membantu Departemen Agama d.h.i Ditjen Bimas Islam di bidang pemberian penasihat perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian. Keputusan Menag ini sampai saat ini belum dicabut dan masih berlaku.

### **2. Kendala**

Kendala BP4 sebagai badan semi resmi pemerintah dalam kegiatannya selama ini dibiayai dari dana NR dan Bedolan, tetapi mengacu kepada undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1999 tentang tata cara penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka Penggunaan Dana NR dan Bedolan untuk kegiatan BP4

dihentikan karena tidak sesuai dengan bunyi Undang-undang dan peraturan Pemerintah tersebut, yang intinya PNPB tidak dapat digunakan kecuali untuk kegiatan tertentu yang berkaitan langsung dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Instansi yang bersangkutan. Temuan BPKP Tahun 2008 menyatakan bahwa BP4 tidak berhak menerima bantuan dari dana NR dan Bedolan karena bukan instansi pemungut.

Melihat kondisi seperti sekarang ini BP4 tidak bisa bergerak secara leluasa mengembangkan program-programnya dibidang penasihatan, pembinaan Perkawinan dan penyelesaian perselisihan dan perceraian, sekalipun telah berupaya mandiri dengan mengembangkan Profesionalitas dibidang SDM dan Organisasi, tetapi semuanya itu berujung pada kemampuan pembiayaan yang sangat terbatas.

3. Untuk itu perlu dikaji ulang tentang kedudukan Organisasi untuk bisa keluar dari kendala yang dihadapi saat ini yaitu dengan menentukan pilihan berada dalam Tupoksi Departemen Agama Cq. Ditjen Bimas Islam atau berada diluar Tupoksi Departemen Agama (Swasta Murni);
  - a. Jika kedudukan BP4 berada di dalam Organisasi Departemen Agama (Masuk dalam Tupoksi Ditjen Bimas Islam), Konsekuensinya adalah APBN, bahwa semua biaya, fasilitas, honorarium konsultan dan seluruh yang terkait dengan sarana, program dan SDM menjadi tanggung jawab Pemerintah yaitu masuk dalam pembiayaan APBN yang jumlahnya tidak kecil termasuk BP4 Kecamatan, Kab/Kota, Provinsi. Sisi baiknya kegiatan BP4 dapat berjalan terus karena diback up dari anggaran APBN, persoalannya adalah "mampukah" dana APBN membiayai semua itu? Disamping sangat sulit mengembangkan organisasi secara maksimal karena ketergantungan yang kuat kepada Pemerintah.
  - b. Bila kedudukan BP4 di luar Tupoksi Departemen Agama, maka BP4 dapat menerima bantuan dana APBN karena sifatnya Lembaga Swasta Murni dan dapat mengembangkan Profesionalitas, yaitu melayani masyarakat dengan sejumlah tarif jasa tertentu seperti jasa Pengacara, Dokter, Psikolog dsb, tetapi tetap harus berada dalam kendali Departemen Agama agar BP 4 tetap pada misinya membantu sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Dengan cara pengurus BP4 harus diisi oleh orang-orang Depag sekalipun bukan pengurus inti tetapi dapat berpengaruh pada level kebijakan, memang sangat sulit memisahkan BP4 dengan induknya karena secara historis BP4 terlahir dan dibidani oleh Departemen Agama, ternyata BP4 sampai saat ini mempunyai fungsi dan peran yang sangat signifikan dalam membantu sebagian tugas Departemen Agama di bidang Pembinaan Penasihatan dan Pelestarian Perkawinan, selain itu BP4 sendiri sudah dikenal masyarakat luas.

Pilihan kedua kiranya patut dipertimbangkan mengingat independensi BP4 secara kelembagaan dapat membawa lembaga ini menjadi lebih dewasa, setarap dengan lembaga swasta lainnya. Kemandirian BP4 sangatlah diperlukan di era reformasi sekarang ini, karena akan membentuk lembaga ini menjadi lebih profesional dalam melayani dinamika permasalahan umat. Demikian dan mohon arahan Bapak lebih lanjut.



# **AD/ ART HASIL MUSYAWARAH NASIONAL BP4 XV/2014**

**Jakarta, 15 – 16 Agustus 2014**

**Oleh :**

**BP4 PUSAT**

**BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) PUSAT  
TAHUN 2014**

**Office :**

**Masjid Istiqlal Ruang 66 Jl. Taman Wijaya Kusumah  
Jakarta Pusat 10710 Telp/ Fax. 021- 3804927**

**Website : [bp4pusat.or.id](http://bp4pusat.or.id)**

**Email : [bp4.pusat@gmail.com](mailto:bp4.pusat@gmail.com)**



## **DAFTAR ISI**

**Halanan**

**I. Kata Pengantar**

**II. Daftar isi**

**III. AD/ ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014**

**Anggaran Dasar BP4**

**Anggaran Rumah Tangga**





**KEPUTUSAN  
MUSYAWARAH NASIONAL BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) XV TAHUN 2014  
NOMOR : 260/2-P/BP4/VIII/2014**

**TENTANG**

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN  
TAHUN 2014**

**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM**

**MUSYAWARAH NASIONAL  
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) XV TAHUN 2014**

- Mengingat : a. bahwa BP4 sebagai lembaga penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan adalah mitra Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah;
- b. bahwa peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam memberikan motivasi kepada para keluarga untuk menanamkan,
- c. melaksanakan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran agama dan akhlaqul karimah;
- d. bahwa untuk melaksanakan misi tersebut, upaya BP4 antara lain mengarahkan dan memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, LSM, Konselor dan Penasihat Perkawinan untuk lebih proaktif demi terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah;
- e. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada butir a sampai c tersebut di atas, Munas XV BP4 yang diselenggarakan pada tanggal 15 s.d. 16 Agustus 2014 di Jakarta, memandang perlu menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) periode tahun 2014 - 2019.
- Menimbang : 1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 1961 jo No. 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 Pusat;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4;
6. Hasil-hasil Munas XV BP4 Pusat tahun 2014.
- Memperhatikan : Pengarahan yang disampaikan oleh :
1. Menteri Agama Republik Indonesia
2. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia

3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI
4. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama RI

Maka setelah mempelajari secara mendalam pengarah-pengarah tersebut dan mempertimbangkan usulan-usulan, saran-saran dan pendapat para peserta, maka Munas BP4 XV:

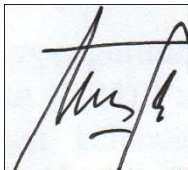
#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) MASA BHAKTI 2014-2019 SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI KEPUTUSAN INI.**

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 16 Agustus 2014

#### MUSYAWARAH NASIONAL BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) XV TAHUN 2014

KETUA SIDANG



DRS. H. NAJIB ANWAR, MH.

SEKRETARIS SIDANG



DRA. HJ. NILMAYETTY, MM.



## **ANGGARAN DASAR BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)**

### **MUKADDIMAH**

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. 30 Ar-Rūm: 21).*

Bahwa untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihat perkawinan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Sejak BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihat Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain; tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan sirri, perkawinan mut'ah, polighami, dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, dan seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai.

Tuntutan BP4 ke depan peran dan fungsinya tidak sekadar menjadi lembaga penasihat tetapi juga berfungsi sebagai lembaga edukasi, mediasi dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi profesionalitas organisasi dalam menjalankan misi sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Sebagai konsekuensi dari profesionalitas, maka BP4 mengemban tugas yang tidak kecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga yang semakin berkembang, perlu sumberdaya manusia yang dibutuhkan terkait dengan mediasi, advokasi dan konsultasi perkawinan. AD/ART ditujukan bagi peningkatan pelayanan organisasi yang bersifat responsif terhadap segala persoalan perkawinan dan keluarga yang muncul dalam masyarakat

### **BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN SIFAT**

#### **Pasal 1**

Organisasi ini bernama Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan disingkat dengan BP4.

#### **Pasal 2**

BP4 Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.



#### Pasal 3

BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

#### Pasal 4

BP4 berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila.

#### Pasal 5

Tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spirituil **dengan:**

1. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah
2. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.
4. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
5. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/ lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.

## **BAB III UPAYA DAN USAHA**

#### Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan 5, BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatan, dan konsultasi/konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik;
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di pengadilan agama;
5. Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat ;
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media massa dan media elektronik yang dianggap perlu;
8. Menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan;
12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 7**

1. Organisasi BP4 disusun sesuai dengan jenjang administrasi pemerintah mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
2. Organisasi BP4 mempunyai bidang-bidang sesuai kebutuhan meliputi:
  - a. Bidang Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan Penasehatan Perkawinan dan Keluarga.
  - b. Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Kursus.
  - c. Bidang Kemitraan, Kerjasama dan Wirausaha.
  - d. Bidang Humas dan Publikasi, dokumentasi
3. BP4 Pusat sampai Tingkat Kecamatan memiliki tenaga Konselor dan Penasihat Perkawinan dan Keluarga.

## **BAB V PENGURUS**

### **Pasal 8**

1. Pembina BP4 tingkat Pusat terdiri dari: Ketua Mahkamah Agung, Menteri Agama RI, Menteri dan Kepala Lembaga terkait; Pembina BP4 tingkat Provinsi adalah Gubernur; Pembina BP4 di tingkat Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota; Pembina di tingkat Kecamatan adalah Camat;
2. Dewan Pertimbangan BP4 terdiri dari unsur pejabat Kementerian Agama dan Peradilan Agama, institusi terkait, ulama, tokoh organisasi Islam dan cendekiawan ;
3. Tim Ahli BP4 terdiri dari tokoh dan para ahli yang berpengalaman dalam pelaksanaan program pembinaan dan penguatan perkawinan dan keluarga yang sakinah yang secara operasional memberikan dukungan kepada pengurus BP4 dalam pelaksanaan program, terutama dalam bentuk pemikiran, ide dan gagasan.
4. Pengurus BP4 terdiri dari ketua umum dan wakil ketua umum, ketua-ketua, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara, wakil bendahara, serta bidang-bidang;
5. Pengurus BP4 sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah pribadi muslim dan muslimah dari instansi pemerintah, ormas Islam, tenaga professional, serta tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu terkait fungsi BP4;
6. Masa bakti pengurus di semua tingkat adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali ketua umum hanya dapat dipilih satu periode berikutnya.

## **BAB VI KEUANGAN**

### **Pasal 9**

Keuangan organisasi diperoleh dari:

- a) Bantuan Pemerintah;
- b) Bantuan Lembaga dari dalam maupun luar negeri yang tidak mengikat;
- c) Infaq, shadaqah dan sumbangan lainnya yang tidak mengikat;
- d) Hasil Usaha yang sah.

## **BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT**

### **Pasal 10**

1. Musyawarah terdiri atas:
  - a. Musyawarah tingkat Nasional disebut Munas, Musyawarah Tingkat Provinsi disebut Muswil, Musyawarah Tingkat Kabupaten/Kota disebut Musda dan Musyawarah Tingkat Kecamatan disebut Muscam;

- b. Musyawarah diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun, dilaksanakan secara berjenjang dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
  - c. Musyawarah dianggap sah jika dihadiri oleh paling kurang dua pertiga dari peserta yang hadir.
2. Rapat terdiri atas Rapat Kerja Nasional, Rapat kerja Daerah dan Rapat Kerja Pengurus :
  - a. Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode;
  - b. Rapat pengurus terdiri atas rapat pengurus pleno dan rapat pengurus harian yang dilaksanakan sesuai dengan keperluan.

#### Pasal 11

1. Keputusan tertinggi berada pada Musyawarah Nasional;
2. Keputusan berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat;
3. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 12

Pada setiap musyawarah dan rapat, setiap anggota mempunyai hak suara yang sama.

### **BAB VIII PENGESAHAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

#### Pasal 13

1. Anggaran Dasar disusun dan disahkan oleh Musyawarah Nasional yang dihadiri oleh paling kurang dua pertiga dari peserta yang hadir;
2. Anggaran Dasar hanya dapat diubah oleh Musyawarah Nasional tersebut pada ayat (1) dengan mendapat suara paling kurang dua pertiga dari peserta yang hadir;
3. Dalam keadaan mendesak sesuai tuntutan organisasi dapat dilakukan review dan penyempurnaan AD/ART BP4 oleh rapat pleno Pengurus pusat sebagai dokumen untuk ditetapkan dalam Munas selanjutnya.

### **BAB IX PEMBUBARAN**

#### Pasal 14

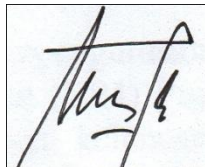
1. Organisasi ini hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2);
2. Jika organisasi ini dibubarkan, maka segala hak miliknya diserahkan kepada organisasi sosial Islam yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan pertimbangan dari Menteri Agama atas usul Musyawarah Nasional tersebut pada ayat (1) pasal ini.

## **BAB X PENUTUP**

1. Anggaran Dasar ini disahkan oleh Musyawarah Nasional BP4 ke XV tanggal 16 Agustus 2014 di Jakarta;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Rangka.

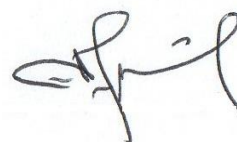
### **MUSYAWARAH NASIONAL BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) XV TAHUN 2014**

**KETUA SIDANG**



**DRS. H. NAJIB ANWAR, MH.**

**SEKRETARIS SIDANG**



**DRA. HJ. NILMAYETTY, MM.**





**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)**

**BAB 1  
KEPENGURUSAN**

**Pasal 1**

- (1) Syarat-syarat menjadi pengurus :
  - a. Beragama Islam
  - b. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun
  - c. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4
  - d. Berakhlak baik
  - e. Memiliki kompetensi dibidang tugas dan fungsi BP4
- (2) Kewajiban Pengurus
  - a. Melaksanakan usaha-usaha untuk mencapai tujuan organisasi
  - b. Menjaga nama baik organisasi
  - c. Membina pengurus pada tingkatan di bawahnya
  - d. Membina keluarga dan masyarakat
- (3) Hak Pengurus
  - a. Hak menyampaikan pendapat
  - b. Hak memilih dan dipilih
  - c. Hak memberi suara
- (4) Berhenti menjadi pengurus
  - a. Atas permintaan sendiri
  - b. Meninggal dunia
  - c. Diberhentikan oleh Rapat Pengurus Pleno yang sah disebabkan kehilangan syarat keanggotaan dan atau berbuat hal-hal yang dapat merusak nama baik organisasi
  - d. Meninggalkan tugas atau tidak dapat menjalankan tugas karena alasan-alasan tertentu yang tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas selama dua tahun berturut-turut
  - e. Anggota yang keberatan atas pemberhentiannya berhak naik banding kepada pengurus yang setingkat lebih tinggi dan keputusannya merupakan keputusan akhir.
- (5) Pengurus yang berhenti dengan alasan seperti tersebut pada ayat (4) dapat diganti posisinya oleh yang lain dengan mekanisme pergantian antar waktu.

**Pasal 2**

- (1) Ketua Umum BP4 Pusat merangkap sebagai formatur dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) BP4.
- (2) Ketua Umum BP4 tingkat Provinsi merangkap sebagai formatur dipilih oleh Musyawarah Wilayah (Muswil) BP4 Provinsi dan ditetapkan oleh BP4 Pusat.
- (3) Ketua BP4 tingkat Kabupaten/Kota merangkap sebagai formatur dipilih oleh Musyawarah Daerah (Musda) BP4 Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh BP4 Provinsi.
- (4) Ketua BP4 tingkat Kecamatan merangkap sebagai formatur dipilih oleh Musyawarah Kecamatan (Muscam) BP4 Kecamatan dan ditetapkan oleh BP4 Kabupaten/Kota.

### Pasal 3

- (1) Penyusunan dan penetapan pengurus disetiap jenjang organisasi dilakukan oleh formatur;
- (2) Penetapan pengurus di tingkat Pusat dilakukan oleh Ketua Umum terpilih.
- (3) Penetapan pengurus di tingkat wilayah, daerah dan kecamatan ditetapkan oleh surat keputusan BP4 setingkat di atasnya.
- (4) Pengisian lowongan dan atau penambahan pengurus dipilih oleh Rapat Pengurus Pleno masing-masing tingkat organisasi.

### Pasal 4

- (1) Pelantikan pengurus BP4 Pusat dilakukan oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pelantikan pengurus BP4 tingkat wilayah dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pelantikan pengurus BP4 tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Pelantikan pengurus BP4 tingkat Kecamatan dilakukan oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk;

### Pasal 5

- (1) Pengurus berkewajiban menjalankan keputusan organisasi;
- (2) Pengurus mengadakan pembagian kerja sehingga masing-masing mempunyai tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (3) Ketua Umum bertanggung jawab atas jalannya organisasi baik keluar maupun ke dalam;
- (4) Untuk kelancaran tugas sehari-hari Ketua Umum dibantu oleh Ketua-Ketua;
- (5) Ketua Umum/Ketua memimpin musyawarah dan rapat-rapat;
- (6) Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh salah satu Ketua/ Sekretaris Umum/Ketua Bidang yang dipilih oleh rapat;
- (7) Sekretaris Umum membantu tugas-tugas pimpinan dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kesekretariatan;
- (8) Bendahara membantu pimpinan dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan;
- (9) Bendahara dan Wakil Bendahara mengadakan pembagian tugas dalam menyelenggarakan pembukuan keuangan dan menghimpun serta memelihara kekayaan organisasi;
- (10) Surat keluar ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Umum, dan hal-hal yang menyangkut teknis cukup ditandatangani Sekretaris Umum.

## **BAB II KEUANGAN**

### Pasal 6

- (1) Keuangan BP4 bersumber dari bantuan yang diterima dari instansi pemerintah, lembaga bantuan dalam dan luar negeri, donatur, dermawan, masyarakat dan pihak-pihak lain secara sah dan tidak mengikat, serta usaha BP4;
- (2) Setiap tingkatan organisasi menyusun Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran.

## **BAB III RAPAT**

### Pasal 7

- (1) Rapat Pengurus Pleno diadakan paling kurang setiap enam bulan sekali;
- (2) Rapat Pengurus Harian dan rapat lainnya diserahkan pada kebijaksanaan pengurus setiap tingkatan organisasi;

- (3) Rapat kerja nasional diadakan sekurang-kurangnya sekali selama masa periode kepengurusan.

#### **BAB IV** **KONSELOR DAN PENASIHAT PERKAWINAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Konselor dan Penasihat Perkawinan diangkat dan diberhentikan oleh pengurus masing-masing tingkatan organisasi
- (2) Konselor dan Penasihat Perkawinan terdiri atas ahli agama, tenaga profesional, mediator perkara di Pengadilan Agama, tokoh masyarakat, dan para ahli di bidang terkait;
- (3) Konselor dan Penasihat Perkawinan disyaratkan :
  - a. Beragama Islam;
  - b. berakhlak baik;
  - c. Sehat jasmani dan rohani;
  - d. Wajib menyimpan rahasia orang yang menjadi klien;
  - e. Sudah berkeluarga;
  - f. Berumur paling kurang 30 tahun;
  - g. Memiliki kompetensi dibidang penasihat perkawinan dan keluarga.

#### **BAB V** **KETENTUAN-KETENTUAN**

##### **Pasal 9**

- (1) Uraian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan kerja pengurus BP4 diatur dengan ketetapan Ketua Umum BP4 Pusat berdasarkan hasil rapat pleno BP4 Pusat;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Ketua Umum berdasarkan hasil Rapat Pleno BP4 Pusat.

#### **BAB VI** **LAMBANG**

##### **Pasal 10**



- (1) Kembang melati yang berwarna putih adalah melambangkan kesucian, keindahan dan kesetiaan dan simbol keluhuran nilai-nilai perkawinan dan keluarga, mengharapkan kesucian, kebahagiaan dan kesetiaan. Jumlah kembang melati 54 artinya mulai lahirnya BP4 tahun 1954 di Jakarta dan Bandung.
- (2) Tiang tegak melambangkan keteguhan, kekuatan, dan kekokohan perkawinan dan keluarga.
- (3) Papan timbangan yang merata dengan daun timbangan kiri kanan, melambangkan keadilan, tidak berat sebelah, tegak di tengah dalam mendapatkan penyelesaian yang adil.
- (4) Obor yang tetap menyala, melambangkan bahwa BP4 akan selalu giat memberikan penerangan/nasihat yang jelas, yang menerangkan kehidupan perkawinan agar suami isteri selalu mengikuti jalan yang lurus.
- (5) Bintang yang bersinar adalah melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Allah SWT.
- (6) Latar belakang berwarna hijau, berarti melambangkan kesuburan agar perkawinan mendapat keberkahan dari Allah SWT.
- (7) Bentuk segi lima di tepi melambangkan Rukun Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara RI.

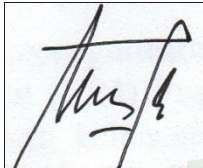
**BAB VII**  
**PENUTUP**

**Pasal 11**

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan oleh Musyawarah Nasional BP4 ke XV tanggal 16 Agustus 2014.

**MUSYAWARAH NASIONAL**  
**BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) XV**  
**TAHUN 2014**

KETUA SIDANG



DRS. H. NAJIB ANWAR, MH.

SEKRETARIS SIDANG



DRA. HJ. NILMAYETTY, MM.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R